



# LAPORAN EVALUASI



## PETA JALAN PENGEMBANGAN SDM UNGGUL DAN TALENTA SEKTOR EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH 2021 – 2024



# LAPORAN EVALUASI PETA JALAN PENGEMBANGAN SDM UNGGUL DAN TALENTA SEKTOR EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH 2021-2024

## **PENASEHAT**

KH. Sholahudin Al Aiyub, M.Si.  
Dr. Sutan Emir Hidayat, MBA

## **TIM PENYUSUN**

Kenny Devita Indraswari M.Ec  
Azizon M.Sc

## **EDITOR**

Mohamad Soleh Nurzaman PhD  
Hayati MPsi., Psi  
Amin Firdaus S.E., M.A.  
Nanda Tri Hardik Tianto

## **TIM ILLUSTRATOR**

Lidya Dewi Nurjanah  
Adzkia Hafidza Elfadz

## **PENERBIT**

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Komplek Kementerian Keuangan, Gedung  
Sutikno Slamet Lantai 18 Jalan Wahidin Nomor 1 Jakarta 10710, Indonesia  
No Telpon: 021-8068-3350  
E-mail: [humas@kneks.go.id](mailto:humas@kneks.go.id)

HAK CIPTA © 2025 Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Indonesia. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak publikasi ini dalam bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

## DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB 1. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan .....	3
1.3. Ruang Lingkup dan Metodologi .....	4
BAB 2. PETA JALAN PEMBANGUNAN SDM UNGGUL DAN TALENTA SEKTOR EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH 2021 - 2024.....	5
2.1. Latar Belakang dan Tujuan Peta Jalan Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021 - 2024.....	5
2.2.1. Arah Pembangunan SDM EKS Klaster Keuangan Komersial Syariah .....	6
2.2.2. Arah Pembangunan SDM EKS Klaster Industri Halal.....	7
2.2.3. Arah Pembangunan SDM EKS Klaster Bisnis dan Kewirausahaan Syariah.....	7
2.2.4. Arah Pembangunan SDM EKS Klaster Keuangan Sosial Syariah .....	8
2.2.5. Visi dan Komponen Strategis Pembangunan SDM Unggul dan Talenta EKS .....	8
2.2.6. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan <i>Milestone</i> Pembangunan SDM Unggul dan Talenta EKS .....	10
BAB 3. IMPLEMENTASI PETA JALAN SDM EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH .....	12
3.1. Keuangan Komersial Syariah.....	12
3.1.1. Implementasi Program Pengembangan SDM Klaster Keuangan Komersial Syariah .....	13
3.1.2. Analisis SWOT Program Pengembangan SDM EKS Klaster Keuangan Komersial Syariah... ..	14
3.2. Keuangan Sosial Syariah.....	15
3.2.1. Implementasi Program Pengembangan SDM Klaster Keuangan Sosial Syariah .....	15
3.3.2. Analisis SWOT Program Pengembangan SDM EKS Klaster Keuangan Sosial Syariah .....	19
3.3. Industri Halal .....	20
3.2.1 Implementasi Program Pengembangan SDM Klaster Industri Halal .....	21
3.3.2. Analisis SWOT Program Pengembangan SDM EKS Klaster Industri Halal.....	24
3.4. Bisnis dan Kewirausahaan Syariah .....	25
3.4.1. Implementasi Program Pengembangan SDM Bisnis dan Kewirausahaan Syariah .....	25
3.4.2. Analisis SWOT Pengembangan SDM Eksyar Klaster Bisnis dan Kewirausahaan Syariah ....	27
BAB 4. EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM PETA JALAN SDM EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH .....	29
4.1. Catatan Kritis dan Poin Evaluasi Implementasi Peta Jalan SDM EKS berdasarkan Klaster .....	29
4.2. Kebutuhan akan Pendekatan Pengembangan SDM EKS yang Tepat.....	33
BAB 5. REKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN KE DEPAN.....	36

5.1. Skenario <i>Positioning</i> KNEKS dalam Program Pengembangan SDM EKS yang Bersifat Intergratif .....	39
5.2. Skenario <i>Positioning</i> KNEKS dalam Program Pengembangan SDM EKS yang Bersifat Direktif .	40
5.3. <i>Pre-Requisites</i> dalam Skenario <i>Positioning</i> KNEKS untuk Program Pengembangan SDM EKS..	43
BAB 6. PENUTUP .....	47

## KATA SAMBUTAN



*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan "Evaluasi Peta Jalan Pengembangan SDM Unggul dan Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021-2024" ini dengan baik.

Laporan ini merupakan wujud komitmen Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam mendorong terciptanya sumber daya manusia unggul yang profesional, berdaya saing, dan Islami, sebagai salah satu pilar penting dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat rujukan global dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Oleh karena itu, keberadaan SDM yang berkualitas menjadi faktor kunci dalam menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada.

Selama periode 2021-2024, implementasi peta jalan ini telah mencakup berbagai program strategis yang melibatkan sektor keuangan komersial, keuangan sosial, industri halal, dan bisnis serta kewirausahaan syariah. Kami menyadari bahwa pelaksanaan program-program ini masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek regulasi, kolaborasi lintas sektor, maupun kapasitas SDM itu sendiri. Oleh karena itu, laporan ini tidak hanya memberikan evaluasi atas capaian yang telah diraih, tetapi juga menyampaikan rekomendasi strategis untuk memastikan keberlanjutan dan relevansi program di masa mendatang.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini, termasuk para mitra strategis, akademisi, dan praktisi yang telah memberikan masukan berharga. Kami berharap laporan ini dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam merumuskan langkah-langkah strategis ke depan demi tercapainya visi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia.

Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan keberkahan kepada kita semua dalam upaya mewujudkan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 7 Januari 2025

Hormat kami,

Sholahudin Al Aiyub

Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS)

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puji dan syukur ke hadirat-Nya atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Atas izin-Nya pula, laporan "**Evaluasi Peta Jalan Pengembangan SDM Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021–2024**" ini dapat tersusun dengan baik sebagai wujud nyata dari komitmen kami dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia di sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Laporan ini disusun untuk mengkaji capaian, tantangan, dan peluang dari pelaksanaan peta jalan pembangunan SDM unggul dan talenta ekonomi syariah yang telah berjalan selama periode 2021–2024. Dalam laporan ini, berbagai analisis mendalam dilakukan terhadap implementasi kebijakan, program strategis, hingga evaluasi kinerja berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Kami berharap laporan ini dapat menjadi refleksi yang komprehensif untuk menyempurnakan langkah-langkah strategis ke depan.

Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah global. Namun, upaya mewujudkan visi tersebut tidak terlepas dari peran sumber daya manusia yang unggul, kompeten, dan berdaya saing. Oleh karena itu, pengembangan SDM menjadi agenda prioritas dalam berbagai inisiatif yang dilaksanakan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). Laporan ini juga menyoroti pentingnya sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, maupun masyarakat, untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Kami menyadari bahwa laporan ini tidak akan terwujud tanpa adanya kerja sama yang erat dan kontribusi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini, baik melalui dukungan data, kajian, diskusi kelompok terarah (FGD), maupun wawancara mendalam (IDI). Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para mitra strategis yang selalu memberikan masukan konstruktif demi penyempurnaan laporan ini.

Kami berharap laporan ini tidak hanya menjadi dokumen evaluasi semata, tetapi juga menjadi panduan strategis untuk langkah ke depan. Semoga laporan ini memberikan manfaat yang besar dalam mengembangkan SDM ekonomi dan keuangan syariah yang tidak hanya unggul secara profesional tetapi juga Islami, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan umat dan pembangunan bangsa.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk, keberkahan, dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah ini.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 7 Januari 2025

Dr. Sutan Emir Hidayat, MBA

Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren yang secara konsisten bersifat progresif. Berbagai sektor keuangan syariah sektor keuangan komersial dan sosial syariah semakin populer dan diterima luas. Total aset keuangan syariah sampai dengan Juni 2024 adalah sebesar Rp2.756,45 triliun dengan *market share* keuangan syariah -- tidak termasuk saham syariah -- mencapai 11,41%. Dari sisi sektor keuangan sosial syariah, pengumpulan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lain (ZIS-DSKL) per Juni 2024 mencapai Rp26,1 triliun atau tumbuh sebesar 68,3% dari tahun sebelumnya. Sedangkan dari sisi wakaf, BWI mencatatkan akumulasi wakaf uang mencapai Rp2,56 triliun atau tumbuh 212% persen sejak peluncuran Gerakan Nasional Wakaf Uang pada Januari 2021 (KNEKS, 2024).

Lebih luas dari berbagai sektor keuangan syariah, industri halal – sebagai bagian integral dari ekonomi dan keuangan syariah – mulai menunjukkan potensi besar dalam berbagai sektor seperti makanan, kosmetik, fashion, pariwisata, dan farmasi. Industri halal kini menjadi pasar global bernilai triliunan dolar yang menarik perhatian banyak negara, termasuk yang di luar dunia Muslim. Indonesia, dengan populasi Muslim terbesar di dunia, tentunya harus menjadi pemain utama dalam industri ini. Secara global, Indonesia menduduki peringkat ketiga dalam Laporan State of Global Islamic Economy (SGIE) 2023/2024. Dalam lima tahun terakhir, peringkat Indonesia dalam SGIE mengalami peningkatan yang signifikan: peringkat 10 pada 2018/2019, peringkat 4 pada 2019 – 2023, hingga mencapai peringkat 3 pada 2023/2024. Dari dalam negeri sendiri, permintaan terhadap produk dan layanan halal di Indonesia berkembang pesat, dengan berbagai sektor dalam rantai nilai halal diperkirakan menyumbang 25,39% terhadap PDB, serta tingkat pertumbuhan yang signifikan pada tahun 2023 (BI, 2023).

Berbagai perkembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia ini tentunya tidak terlepas dari multi-faktor baik eksternal maupun internal, di antara nya adalah penguatan pada berbagai bidang seperti infrastruktur dan regulasi, literasi dan inklusi, pendidikan serta penelitian. Dari segi infrastruktur dan regulasi ekonomi keuangan syariah di Indonesia, saat ini telah terbentuk Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di 24 provinsi. Selain itu, sepanjang tahun 2023, ada satu Undang-Undang, yaitu UU No. 4 Tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan yang memperkuat UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, serta lima Peraturan OJK (POJK), satu Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang baru yang berfokus atau berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah, dan dua rencana pengembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah (PEBS FEB UI, 2024).

Di balik perkembangan yang masif dan terstruktur ini, sektor ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar terkait dengan ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurut Islamic Finance Development Report 2022, Indonesia menduduki peringkat pertama dalam bidang pendidikan keuangan syariah, mengungguli Malaysia dan Bahrain. Pada tahun 2021, Indonesia memiliki 954 program studi di bidang ekonomi dan keuangan syariah, mulai dari tingkat diploma hingga doktor. Namun, kesenjangan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) pada berbagai sektor ekonomi dan keuangan syariah masih menjadi salah satu isu utama yang terus berlangsung dalam rentang perkembangan sektor ini. Data OJK per 2023 menunjukkan bahwa 80-90% SDM di industri keuangan syariah tidak berasal dari bidang syariah atau terkait.

Pada hakikatnya, keberadaan dan kebermanfaatan ekonomi dan keuangan syariah tidak hanya dapat dinikmati oleh para pihak yang terlibat dalam ekosistem ini. Secara lebih luas lagi, sebagai mana nilai dan ajaran Islam sebagai *rahmatan lil 'alamin*, nilai-nilai ekonomi dan keuangan syariah harus dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Nilai ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat pada berbagai tahap kehidupan. Prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, menjadikan produk dan layanan keuangan syariah relevan bagi individu dan keluarga di berbagai tahap kehidupan. Dari pembiayaan pendidikan bagi anak-anak, kepemilikan rumah bagi keluarga muda, hingga investasi dan perencanaan pensiun, keuangan syariah menawarkan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan mendukung kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.

Bagi generasi muda, pemahaman dan penerapan nilai-nilai keuangan syariah sejak dini sangat penting. Dengan adanya 954 program studi di bidang ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia, generasi muda memiliki kesempatan untuk mempelajari prinsip-prinsip syariah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup pengelolaan keuangan pribadi, investasi yang halal, serta partisipasi dalam kegiatan ekonomi yang beretika. Relevansi keuangan syariah juga penting bagi generasi yang lebih muda, seperti siswa SMP dan SMA. Mengenalkan konsep keuangan syariah pada usia dini dapat membentuk pola pikir yang bertanggung jawab dan etis terhadap keuangan. Mata pelajaran yang mencakup dasar-dasar keuangan syariah, seperti pentingnya zakat, larangan riba, dan prinsip berbagi risiko, dapat diintegrasikan dalam kurikulum sekolah. Dengan demikian, siswa dapat memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dan prinsip-prinsip syariah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari menabung hingga merencanakan masa depan. Pembelajaran ini akan membekali mereka dengan keterampilan yang berguna, tidak hanya untuk kehidupan



pribadi tetapi juga untuk kontribusi mereka di masa depan dalam membangun ekonomi yang lebih berkelanjutan dan adil.

Selain itu, bagi keluarga dan masyarakat umum, keuangan syariah menawarkan berbagai produk yang dapat meningkatkan kualitas hidup. Produk seperti pembiayaan rumah, pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta asuransi syariah, dirancang untuk memenuhi kebutuhan finansial dengan cara yang adil dan berkelanjutan. Implementasi keuangan syariah dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa transaksi dan investasi dilakukan secara etis dan bertanggung jawab. Dengan demikian, nilai-nilai ekonomi dan keuangan syariah dapat dinikmati dan diterapkan oleh masyarakat di berbagai tahap kehidupan, mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pada tahun 2021 Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) meluncurkan Peta Jalan Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah: SDM Profesional, Unggul dan Berdaya Saing. Peta jalan ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk merencanakan dan menyusun program-program strategis dalam meningkatkan kapasitas serta kompetensi SDM dan talenta di sektor ekonomi dan keuangan syariah secara lebih fokus dan terukur. Dengan demikian, para pemangku kepentingan dalam ekonomi dan keuangan syariah diharapkan dapat menetapkan arah dan prioritas pengembangan SDM di setiap industri atau lembaga, khususnya dalam rangka mempersiapkan diri menghadapi perkembangan terkini dan perubahan yang akan datang.

Dengan berakhirnya periode peta jalan ini, proses evaluasi perlu dilakukan agar dapat mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam proses implementasinya. Evaluasi ini akan memungkinkan pemetaan ulang terhadap program-program prioritas yang bisa diajukan untuk periode mendatang, sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang mendukung pencapaian target lebih efektif. Dengan evaluasi yang komprehensif, peta jalan ini dapat terus disesuaikan dengan dinamika perkembangan ekonomi dan keuangan syariah, memastikan bahwa inisiatif peningkatan kapasitas SDM dan pengembangan sektor tetap relevan dan mampu merespons kebutuhan industri yang terus berkembang.

## **1.2. Tujuan**

Kajian evaluasi Peta Jalan Pengembangan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021 – 2024 bertujuan untuk:

1. Melakukan analisis terhadap pelaksanaan Implementasi peta jalan pembangunan SDM EKS Indonesia
2. Memberikan evaluasi terhadap Implementasi pengembangan SDM EKS Indonesia
3. Memberikan rekomendasi kebijakan pengembangan SDM EKS Indonesia

### **1.3. Ruang Lingkup dan Metodologi**

Pembahasan dari kajian ini memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

1. Analisis Implementasi peta jalan pembangunan SDM EKS Indonesia
2. Analisis evaluasi dalam pengembangan pembangunan SDM EKS Indonesia dari implementasi yang telah dilakukan dan perubahan/perbaikan yang perlu dilakukan ke depannya
3. Rekomendasi kebijakan implementatif dan strategis dalam pengembangan SDM EKS Indonesia

Objek dari kajian ini meliputi internal KNEKS maupun eksternal KNEKS (yaitu *stakeholders* terkait), dengan metodologi kajian menggunakan sumber data berupa telaah laporan dan dokumen dari objek dan dianalisis menggunakan metode eksplorasi dan identifikasi melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan *In-Depth Interview* (IDI) dengan objek kajian.

## BAB 2. PETA JALAN PEMBANGUNAN SDM UNGGUL DAN TALENTA SEKTOR EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH 2021 - 2024

### 2.1. Latar Belakang dan Tujuan Peta Jalan Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021 - 2024

Pada tahun 2021, KNEKS meluncurkan Peta Jalan Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul dan Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah: SDM Profesional, Unggul, dan Berdaya Saing untuk periode 2021 – 2024. Beberapa kondisi yang melatarbelakangi lahirnya peta jalan ini, diantaranya:

- 1) Disparitas Kualifikasi dan Kompetensi SDM Ekonomi dan Keuangan Syariah  
Para lulusan dari program studi berlatar ekonomi dan keuangan syariah masih dipersepsikan tidak dilengkapi dengan kompetensi teknis yang relevan dengan kebutuhan industri. Di sisi lain, industri ekonomi dan keuangan syariah sebagai *user* masih lebih memilih untuk memilih lulusan dari program studi lain yang dianggap lebih *prominent* untuk kemudian diberi pengetahuan dan keterampilan dasar mengenai ekonomi dan keuangan syariah,
- 2) Transformasi Sistem Kerja Akibat Pandemi Covid-19  
Pandemi Covid-19 yang mau tidak mau membuat pergeseran sistem kerja tidak harus hadir secara fisik, ditambah lagi dengan disrupsi teknologi informasi, membuat SDM secara umum menjadi rentan untuk dengan mudah digantikan dengan fungsi kecerdasan buatan dan *piloting machine*.
- 3) Disrupsi Teknologi Informasi dan Peran *Artificial Intelligence* serta *Internet of Things*  
Adanya disrupsi yang bersumber dari pesatnya kemajuan teknologi informasi membuat berbagai pekerjaan yang bersifat rutin, statis, dan administratif dapat diselesaikan oleh berbagai produk perkembangan teknologi informasi sehingga kemampuan yang bersifat *hard skill* bagi jenis pekerjaan seperti ini menjadi tidak begitu relevan lagi.
- 4) Pembangunan SDM Ekonomi dan Keuangan Syariah Sejak Dini  
Pembangunan SDM sejak dini memegang peranan penting untuk mewujudkan talenta syariah yang unggul, profesional, dan Islami. Namun sayangnya, peran tokoh agama atau *key opinion leaders* yang relevan masih dianggap minim untuk dapat memberikan pemahaman mengenai relevansi nilai-nilai ekonomi dan keuangan syariah kepada berbagai lapisan masyarakat.
- 5) Masih Rendahnya Literasi dan Keterlibatan Pemangku Kepentingan

Hampir serupa dengan poin sebelumnya, masih dianggap minimnya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan yang ada berimplikasi pada rendahnya literasi masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah.

Berdasarkan permasalahan yang ada, diiringi dengan tantangan yang menyertai sektor ini, maka Peta Jalan Pembangunan Sumber Daya Manusia Unggul dan Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah disusun untuk mencapai berbagai tujuan, seperti:

- 1) Mendukung pencapaian target Indonesia sebagai *global hub* pada tahun 2024 yang menempatkan SDM sebagai tulang punggung pengaktif (*enabler*) dengan *milestone* yang terencana, terstruktur, dan terarah dalam rencana aksi pembangunan SDM unggul dan talenta sektor ekonomi dan keuangan syariah yang holistik dan integralistik;
- 2) Memberikan visi dan arah pengembangan SDM unggul dan talenta sektor ekonomi dan keuangan syariah dalam skema pembangunan SDM yang komprehensif sejak dini, berkelanjutan, dan terus menerus, guna mewujudkan Indonesia sebagai pusat rujukan global pembangunan SDM unggul dan talenta syariah;
- 3) Mendorong seluruh pemangku kepentingan di sektor ekonomi dan keuangan syariah untuk secara aktif, kolaboratif, dan partisipatif dalam membangun dan mewujudkan SDM dan talenta yang unggul, profesional, dan menjunjung tinggi nilai-nilai syariah guna meraih pencapaian target Indonesia sebagai *global hub* pada tahun 2024;
- 4) Menyusun sasaran strategis, indikator kinerja, target, serta strategi dan rencana aksi pembangunan SDM unggul dan talenta di sektor ekonomi dan keuangan,

Pengembangan SDM yang dirumuskan dalam peta jalan ini diselenggarakan secara holistik integralistik, dengan menghubungkan antara proses internalisasi dini hingga pembelajaran sepanjang hayat (*long life education, learning, and development*) untuk mencapai talenta yang mampu menjadikan Indonesia sebagai pusat rujukan Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah.

#### 2.2.1. Arah Pembangunan SDM EKS Klaster Keuangan Komersial Syariah

Rencana aksi pembangunan SDM unggul dan talenta pada klaster keuangan komersial syariah diformulasikan berdasarkan pada strategi dan arah pengembangan di sektor perbankan syariah, pasar modal syariah, dan IKNB syariah, yang secara garis besar memiliki 4 (empat) program utama, yakni:

- 1) Menyelenggarakan TOT SDM keuangan syariah secara berkala dan berjenjang;
- 2) Mengembangkan, harmonisasi, dan penyebarluasan modul pengembangan SDM keuangan syariah di perguruan tinggi;

- 3) Sertifikasi kompetensi dan penguatan IT yang terintegrasi;
- 4) Mendorong berdirinya infrastruktur sertifikasi kompetensi melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Keuangan Syariah yang mendapatkan lisensi dari BNSP ataupun akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional.

### 2.2.2. Arah Pembangunan SDM EKS Klaster Industri Halal

Pada klaster industri halal, arah pengembangan yang menjadi rujukan dalam penyusunan Peta Jalan Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah tahun 2021-2024 merupakan program kerja utama KNEKS tahun 2021 – 2024 pada bidang industri halal, yaitu:

- 1) Pembangunan Zona Industri dan Kawasan Industri Halal (KIH);
- 2) Sertifikasi / Kodifikasi Halal Produk Ekspor dan Halal *Traceability*;
- 3) Pengembangan *Halal Hub Port* (Laut dan Udara);
- 4) Pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) Nasional;
- 5) Modernisasi Rumah Potong Hewan (RPH) Halal;
- 6) Program Nasional Pembinaan Menuju UMKM Bersertifikasi Halal;
- 7) Pengembangan Pariwisata Ramah Muslim;
- 8) Pengembangan Industri Kesehatan Syariah.

Berbagai program kerja utama ini memerlukan skala prioritas yang berbentuk:

- 1) Pengembangan infrastruktur dan klaster industri halal sebagai kontributor penting ekonomi nasional;
- 2) Berkembangnya standar halal atau *halal assurance system* yang kompetitif untuk mendukung percepatan industri produk halal nasional;
- 3) Peningkatan kontribusi industri halal terhadap neraca perdagangan nasional di sektor – sektor unggulan.

### 2.2.3. Arah Pembangunan SDM EKS Klaster Bisnis dan Kewirausahaan Syariah

Arah pengembangan pembangunan SDM unggul dan talenta ekonomi dan keuangan syariah pada klaster ini dibentuk berdasarkan arah kebijakan sebagaimana program kerja utama pada klaster bisnis dan kewirausahaan syariah meliputi 5 aspek sebagai berikut:

- 1) Program pembinaan dan peningkatan skala usaha UMK Halal Nasional;
- 2) IPO usaha syariah dan penerbitan *corporate sukuk*;
- 3) Inkubasi eksportir produk halal dan kemitraan dengan usaha besar;
- 4) Akselerasi digitalisasi informasi dan usaha syariah;

- 5) Pendirian pusat data ekonomi syariah Indonesia.

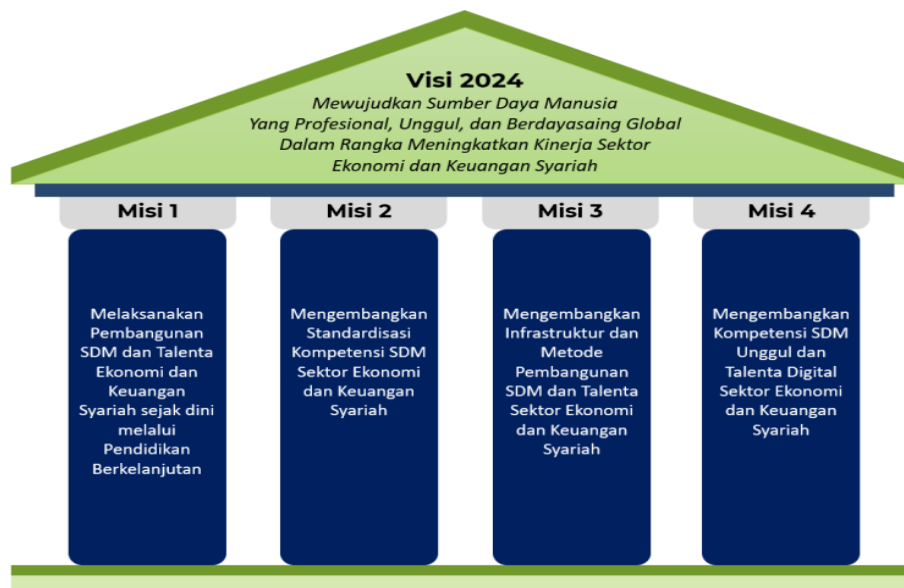
#### 2.2.4. Arah Pembangunan SDM EKS Klaster Keuangan Sosial Syariah

Arah pengembangan pembangunan SDM unggul dan talenta ekonomi dan keuangan syariah berdasarkan arah kebijakan sebagaimana program kerja pada klaster keuangan sosial syariah meliputi 4 program kerja utama sebagai berikut:

- 1) Transformasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah nasional;
- 2) Transformasi pengelolaan wakaf nasional;
- 3) Institusi keuangan mikro syariah yang berkelanjutan;
- 4) Perluasan dan penguatan jaringan layanan keuangan syariah berbasis pesantren.

#### 2.2.5. Visi dan Komponen Strategis Pembangunan SDM Unggul dan Talenta EKS

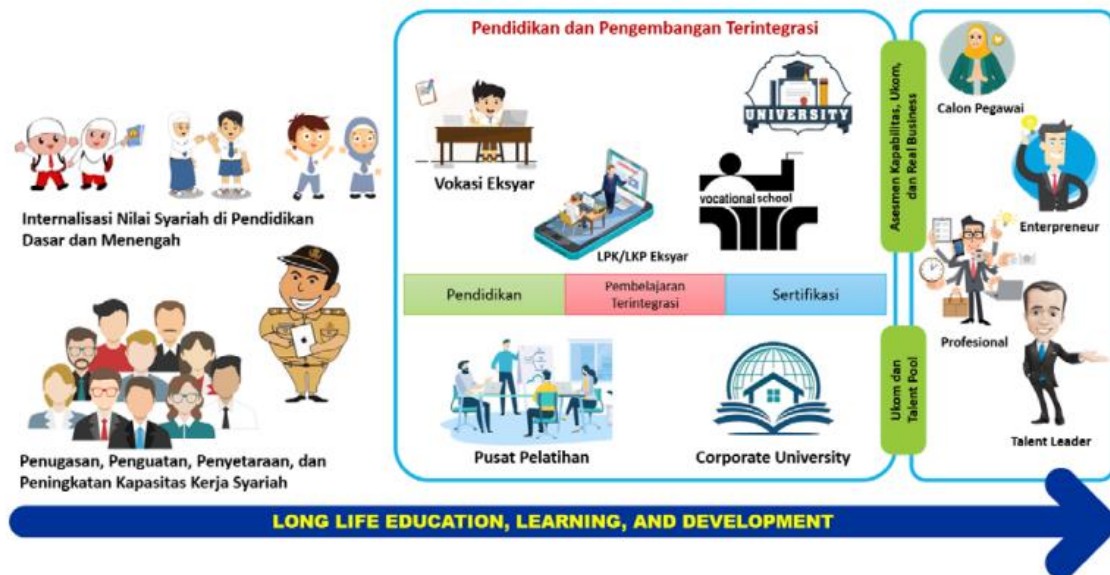
Berangkat dari pemetaan arah pembangunan SDM ekonomi dan keuangan syariah dari masing-masing klaster, Peta Jalan Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah merumuskan Visi 2024 untuk mewujudkan SDM yang professional, unggul, dan berdayasaing global dalam rangka meningkatkan kinerja sektor ekonomi dan keuangan syariah. Dalam pencapaian visi tersebut, dirumuskan pula 4 misi yang menopang (lihat Figur 2.1.).



**Figur 2.1. Kerangka Visi dan Misi Peta Jalan Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021 – 2024** (Sumber: KNEKS, 2021)

Proses dalam pembangunan SDM EKS unggul ini tentunya diharapkan berlangsung sepanjang hayat melalui *long life education, learning, and development* (lihat Figur 2.2.). Internalisasi nilai syariah sudah mulai diberikan di jenjang pendidikan dasar dan pradasar hingga pendidikan

menengah. Saat masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, pendalaman materi dan keahlian diberikan secara faktual. Pembelajaran diselenggarakan secara integratif dan kriteria hasil pembelajaran adalah mampu menghasilkan talenta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri di sektor ini.



**Figur 2.2. Kerangka Visi dan Misi Peta Jalan Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021 - 2024**

(Sumber: KNEKS, 2021)

Untuk dapat mewujudkan Visi Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah pada tahun 2024, maka beberapa kriteria untuk menjadikan SDM syariah berkualitas kelas dunia perlu dijadikan sebagai rujukan, di antaranya: capaian kompetensi syariah yang bersifat generik bagi seluruh profesional di bidang ekonomi dan keuangan syariah, harus memiliki kemampuan *learning agility* yang berkesinambungan, berintegritas tinggi, serta dapat diandalkan.

Komponen strategis pembangunan SDM unggul dan talenta ekonomi dan keuangan syariah meliputi: ekosistem, kebijakan, sasaran strategis, indikator kinerja utama (IKU) dan target, *core values*, dan sistem monitoring dan evaluasi (lihat Figur 2.3.).



**Figur 2.3. Komponen Strategis Pembangunan SDM Unggul dan Talenta EKS**  
(Sumber: KNEKS, 2021)

## 2.2.6. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Milestone Pembangunan SDM Unggul dan Talenta EKS

**Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Jumlah IKU Peta Jalan Pembangunan SDM Unggul dan Talenta EKS**

No	Sasaran Strategis	Jumlah IKU
1	Peta Kualifikasi SDM Unggul dan Talenta Ekonomi dan Keuangan Syariah	2
2	Perumusan Rencana Induk Pengembangan SKKNI Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	4
3	Penyusunan SKKNI Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah berdasarkan KBLI 2020, kebutuhan industri, dan adaptasi standar internasional	4
4	Pelaksanaan Sertifikasi Penyetaraan Kompetensi Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	4
5	Pelaksanaan Sertifikasi Ahli Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	4
6	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	3
7	Pengembangan Kompetensi SDM sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	7
8	Pengembangan Sistem Manajemen Talenta Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	5
9	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Literasi Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah	8

Milestone Pembangunan SDM Unggul dan Talenta Sektor Ekonoi dan Keuangan Syariah terkonsentrasi pada 4 (empat) tahapan utama yang dibagi berdasarkan tahun (lihat Tabel 2.1.).



**Tabel 2.2. Sasaran Strategis dan Jumlah IKU Peta Jalan Pembangunan SDM Unggul dan Talenta EKS**

Tahun	Milestone	Uraian
2021	Peletakan pondasi SDM Unggul dan Talenta EKS	Pada tahapan ini sejumlah program unggulan strategis dan rencana aksi dijalankan oleh pemangku kepentingan, mulai dari perancangan kebijakan pembangunan SDM, harmonisasi dan penyelarasan kebijakan antar pemangku kepentingan, peningkatan kapasitas SDM unggul dan talenta melalui program-program pengembangan kompetensi, sertifikasi, dan pelatihan terintegrasi, hingga pemantapan dan
2022	Penguatan dan pemantapan karakter Islami SDM dan Talenta EKS yang profesional	program literasi nasional, dan berbagai program unggulan strategis lainnya yang akan dijabarkan secara spesifik di dalam program pembangunan SDM unggul dan talenta ekonomi dan keuangan syariah tahun 2021-2024
2023	Standarisasi global SDM dan talenta EKS	<i>Bridging</i> untuk memantapkan posisi Indonesia sebagai pusat rujukan global pembangunan SDM dan talenta ekonomi dan keuangan syariah telah tuntas dilakukan dengan program standarisasi global. Untuk mewujudkan program standarisasi global tersebut yang harus dilakukan adalah dengan mengadaptasi standar kompetensi internasional ke dalam standar kompetensi kerja sektor ekonomi dan keuangan syariah. Adaptasi SKI juga diikuti dengan penggalan terhadap kompetensi
2024	SDM dan talenta EKS yang professional, unggul, dan Islami	berskala global pada kluster-kluster yang ada di dalam sektor ekonomi dan keuangan syariah

### BAB 3. IMPLEMENTASI PETA JALAN SDM EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

Dalam melaksanakan berbagai program pengembangan SDM EKS, KNEKS bermitra dengan berbagai *stakeholders* dari kementerian, lembaga, maupun asosiasi dalam menjalankan berbagai program terkait (lihat Tabel 3.1.).

**Tabel 3.1. Stakeholders Utama Masing-Masing Klaster**

<b>Klaster</b>	<b>Stakeholders Utama</b>
Keuangan Komersial	BI, OJK, Kemeterian Keuangan, Asosiasi
Keuangan Sosial	BI, OJK, KDEKS, Kementerian Agama, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi dan UMKM, Dinas Koperasi, Asosiasi, BMT FOZ, Perguruan Tinggi Negeri, Badan Wakaf Indonesia, BAZNAS, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Industri Halal	BPJPH, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UMKM, Bappenas, BUMN, Kementerian Perhubungan
Bisnis dan Kewirausahaan Syariah	Kementerian Koperasi dan UMKM, KADIN, Kementerian Keuangan, KDEKS, MES

#### 3.1. Keuangan Komersial Syariah

Berdasarkan Peta Jalan Pengembangan SDM EKS, 2021-2024, arah pengembangan SDM dalam bidang sektor keuangan komersial syariah berfokus pada penguatan kapasitas SDM di antaranya melalui TOT, modul, dan sertifikasi. Pada klaster keuangan komersial syariah, diharapkan peningkatan SDM tentunya tidak hanya menasar pada pelaku yang berada pada industri keuangan syariah namun juga masyarakat secara umum dari segala lapisan sosio – ekonomi – demografi. Literasi keuangan syariah penting bagi masyarakat umum karena membantu mereka memahami prinsip-prinsip dasar keuangan syariah seperti larangan riba (bunga), maysir (perjudian), dan gharar (ketidakpastian). Dengan pemahaman ini, masyarakat dapat menghindari transaksi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, serta memastikan bahwa kegiatan keuangan mereka bersifat etis dan sesuai dengan hukum syariah. Pengetahuan ini juga memungkinkan masyarakat untuk memanfaatkan produk-produk keuangan syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan investasi syariah, yang dapat memberikan alternatif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

### 3.1.1. Implementasi Program Pengembangan SDM Kluster Keuangan Komersial Syariah

Kluster Keuangan Komersial Syariah di KNEKS berada di bawah Direktorat Jasa Keuangan Syariah yang terdiri dari tiga divisi, yakni: Divisi Perbankan Syariah, Divisi Jasa Keuangan Syariah Non-Perbankan Syariah, dan Divisi Pasar Modal Syariah. Fokus program pengembangan Kluster Keuangan Komersial Syariah KNEKS berfokus pada pembiayaan KPBU Syariah, Layanan Jaminan Sosial Syariah Nasional, Shariah Restricted Investment Account (SRIA), dan Sukuk Daerah. Dengan demikian, program pengembangan SDM EKS yang dilakukan pada kluster keuangan komersial syariah lebih banyak bersifat *embedded* atau terintegrasi dengan empat fokus tersebut. Bentuk program pengembangan SDM EKS meliputi *capacity building* bagi para pelaku teknis atau pelaksana program serta dalam bentuk literasi dan edukasi yang dikhususkan bagi masyarakat umum.

#### 1. *Capacity Building* Pengembangan Pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Syariah dan *Shariah Restricted Investment Account* (SRIA)

Pada tahun 2018, OJK telah melakukan kajian terkait inovasi produk investasi ini yang dikenal sebagai *Sharia Restricted Intermediary Account* (SRIA). Di tahun 2019, KNEKS menyusun *concept note* pengembangan produk SRIA dan melakukan diskusi serta koordinasi dengan *stakeholder* untuk mengupayakan realisasi *pilot project* implementasi produk SRIA oleh bank syariah. *Stakeholders* utama mencakup OJK, Bank Indonesia (BI), Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia (BEI), Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), Dewan Standar Akuntansi Syariah Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAS IAI), Asosiasi Bank Syariah Indonesia (ASBISINDO), Asosiasi Manajer Investasi Indonesia (AMII), dan Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf). Sedangkan untuk Pengembangan Pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Syariah, KNEKS sudah mendorong KPBU Syariah sejak tahun 2019, dimana KNEKS bersama dengan PT PII dan DSN-MUI menyusun *concept note* KPBU Syariah. Dalam konteks program terkait pengembangan SDM untuk kedua program tersebut, fokus utama dari KNEKS adalah dalam hal *capacity building* bagi para pelaku pembiayaan KPBU dan SRIA, salah satunya melalui pembimbingan teknis.

#### 2. Literasi dan Edukasi Layanan Jaminan Sosial Syariah dan Sukuk Daerah

Layanan Jaminan Sosial Syariah (Jamsosnaker) adalah program prioritas Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) untuk menyediakan perlindungan jaminan sosial yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Program pengembangan SDM yang

dilakukan KNEKS untuk program ini lebih berfokus pada literasi dan edukasi produk, misalnya melalui kegiatan *talkshow* dengan topik “Pengembangan Ekonomi Syariah Melalui Layanan Syariah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Tabungan Perumahan Rakyat”. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi tentang Layanan Syariah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Tabungan Perumahan Rakyat sehingga diharapkan dapat meningkatkan cakupan kepesertaan serta mendorong optimalisasi dana syariah jangka panjang.

#### *Kolaborasi Pelaksanaan Program*

Terdapat beragam program pengembangan SDM EKS industri halal yang merupakan hasil kolaborasi internal antar divisi KNEKS maupun dengan berbagai mitra strategis KNEKS misalnya BI, OJK, dan Kementerian keuangan. Salah satu jenis program pengembangan SDM bidang keuangan komersial syariah yang paling masif adalah terkait dengan literasi keuangan syariah di berbagai level. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan tujuan dan target yang ingin dicapai oleh berbagai stakeholders terutama dalam meningkatkan *awareness* masyarakat terhadap ekonomi dan keuangan syariah.

### 3.1.2. Analisis SWOT Program Pengembangan SDM EKS Klaster Keuangan Komersial Syariah

Dalam melakukan analisis mendalam terhadap monitoring program pengembangan SDM di sektor keuangan komersial syariah yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir, salah satu metode untuk memahami perkembangan dan situasi lapangan dalam pengembangan SDM ini adalah dengan melakukan analisis SWOT.

Strengths	Weaknesses
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kolaborasi dan kemitraan yang baik dengan stakeholders</b> <i>Kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan terjalin dengan baik karena secara natural industry keuangan komersial sudah lebih firm dibandingkan sektor EKS lainnya.</i></li> <li>• <b>Program literasi dan capacity building yang sudah melekat dengan program</b> <i>Dalam menjalankan program pengembangan SDM EKS, KNEKS dan para mitra strategis secara terstruktur dan terencana memasukkan program pengembangan SDM ke dalam program prioritas mereka.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Pada beberapa program, SDM yang terlibat belum memiliki pengetahuan EKS yang memadai</b> <i>Dalam beberapa program prioritas ditemukan bahwa SDM pelaksana yang bertanggung secara teknis masih memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai EKS.</i></li> </ul>

Opportunities	Threats
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Regulasi sudah terstandarisasi</b> Secara umum regulasi terkait kompetensi SDM yang dibutuhkan dalam sektor ini sudah relatif lebih lengkap dibandingkan sektor lainnya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Literasi dan <i>acceptance</i> masyarakat untuk beberapa produk atau layanan tertentu masih menjadi tantangan Tingkat literasi keuangan syariah yang masih terbatas masih menjadi tantangan dalam implementasi produk atau layanan baru keuangan komersial syariah.</li> </ul>

**Figur 3.1. SWOT Matriks Keuangan Komersial Syariah**

### 3.2. Keuangan Sosial Syariah

Sektor keuangan sosial syariah merupakan salah satu sektor yang memiliki *competitive advantage* sendiri dalam ekosistem EKS. Berbeda dengan sektor keuangan sosial di ekosistem konvensional yang lebih berperan sebagai sektor pelengkap, posisi sektor keuangan sosial syariah menjadi lebih besar seiring dengan posisi instrumentnya yang cukup krusial dalam ekosistem ekonomi Syariah seperti zakat dan wakaf. Selain itu, jika berkaca pada pembagian wewenang KNEKS, klaster keuangan sosial syariah juga memiliki peran khusus dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah secara umum.

Berdasarkan Peta Jalan Pengembangan SDM EKS 2021-2024 terdapat beberapa arah kebijakan sektor keuangan sosial syariah yaitu: Arah pengembangan pembangunan SDM unggul dan talenta ekonomi dan keuangan syariah berdasarkan arah kebijakan sebagaimana program kerja pada klaster keuangan sosial syariah meliputi 4 program kerja utama sebagai berikut: Transformasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah nasional; Transformasi pengelolaan wakaf nasional; Institusi keuangan mikro syariah yang berkelanjutan; Perluasan dan penguatan jaringan layanan keuangan syariah berbasis pesantren.

#### 3.2.1. Implementasi Program Pengembangan SDM Klaster Keuangan Sosial Syariah

Klaster Keuangan Sosial Syariah di bawah KNEKS memiliki tiga divisi utama dalam pengembangan dan pelaksanaan program: Divisi Inklusi Keuangan Syariah, Divisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS), dan Divisi Dana Sosial Syariah. Setiap divisi memiliki peran penting dalam koordinasi dan eksekusi program di bidang keuangan sosial syariah termasuk pada peningkatan SDM di bidang ini. Berdasarkan hasil FGD dan sumber informasi terkait lainnya, maka dapat diidentifikasi beberapa implementasi program di klaster ini termasuk beberapa program yang berkaitan dengan pengembangan SDM Ekonomi Syariah sebagai berikut:

## **1. Peningkatan Kapasitas Digital untuk Pengurus BMT**

Salah satu program Klaster Keuangan Sosial Syariah yang berkaitan dengan pengembangan SDM Ekonomi Syariah adalah Program BMT 4.0. Program BMT 4.0 adalah inisiatif dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) yang fokus pada transformasi digital dan keberlanjutan Baitul Maal wat-Tamwiil (BMT). Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas BMT dalam mendukung Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pelatihan yang komprehensif. Digitalisasi BMT adalah salah satu komponen kunci dari program ini, yang diharapkan dapat memperkuat pilar-pilar pengembangan BMT dan memecahkan berbagai permasalahan yang ada. Program ini diadakan dengan tujuan untuk memperkuat dan mendukung keberlanjutan UMKM di Indonesia. Mengingat UMKM merupakan tulang punggung ekonomi nasional dengan kontribusi signifikan terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja, menjaga kelangsungan hidup dan pengembangan UMKM menjadi sangat penting. BMT, sebagai lembaga yang mendukung UMKM, harus diperkuat melalui pengawasan yang baik dan digitalisasi agar dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam perekonomian nasional. Program BMT 4.0 juga diintegrasikan dengan sekolah pelopor ekonomi Syariah divisi SDM. Kegiatan ini telah diimplementasikan di beberapa provinsi, seperti Sumatera Barat dan Sulawesi Selatan. Kolaborasi yang dilakukan dengan Divisi SDM dilakukan untuk menyelaraskan program pelatihan dan pengembangan SDM di BMT dengan kebutuhan dan standar yang berlaku.

## **2. Penguatan SDM Ekonomi dan Keuangan Syariah di Pesantren dan Masjid Program Inklusi Keuangan Syariah Berbasis Komunitas (Pesantren dan Masjid)**

Program lain yang berkaitan dengan pengembangan SDM EKS pada klaster keuangan sosial adalah program inklusi keuangan Syariah berbasis komunitas yaitu masjid dan pesantren. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat keuangan syariah di pesantren maupun di masjid dengan menyediakan panduan dan pelatihan bagi pengelola keuangan di pesantren dan di masjid. Khusus untuk pengembangan keuangan Syariah di pesantren juga dilengkapi dengan Roadmap pengembangan keuangan Syariah berbasis pesantren. Secara umum program inklusi berbasis komunitas ini berkolaborasi erat dengan Divisi Pendidikan dan Pelatihan di KNEKS untuk memastikan bahwa kurikulum dan modul pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pendidikan pesantren dan mengikuti perkembangan terbaru dalam keuangan syariah. Fokus terhadap pengembangan berbasis komunitas ini juga merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia.

### **3. Peningkatan Kapasitas dan Literasi Digital SDM LKMS - Strategi Pengembangan LKMS dan Digitalisasi**

Salah satu fokus Divisi LKMS KNEKS berfokus pada peningkatan kapasitas dan efisiensi operasional LKMS melalui pengembangan strategi dan program digitalisasi. Pada tahun 2019, sebuah strategi nasional untuk pengembangan LKMS di Indonesia telah disusun, yang mencakup pelatihan SDM terkait penggunaan aplikasi *core system* untuk LKMS di berbagai daerah. Program ini tidak hanya melibatkan bimbingan teknis tetapi juga menyediakan *core system* gratis untuk membantu LKMS yang masih berkembang. Dalam pelaksanaannya, divisi ini bekerja sama dengan Divisi Inklusi Keuangan Syariah untuk memastikan inklusi dan literasi keuangan yang lebih luas melalui teknologi.

### **4. Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Zakat - Transformasi Zakat Nasional**

Program ini difokuskan pada peningkatan pengelolaan zakat di tingkat nasional. Melalui program ini, SDM di lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS dan Forum Zakat (FOZ) diberikan pelatihan intensif untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam mengelola zakat. Divisi Dana Sosial Syariah bekerja sama dengan Divisi Pendidikan dan Pelatihan serta Divisi SDM di KNEKS untuk memastikan program pelatihan yang komprehensif dan berkelanjutan.

### **5. Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Wakaf - Transformasi Wakaf Nasional**

Program ini bertujuan untuk memperkuat pengelolaan wakaf dengan fokus utama pada pengembangan kapasitas nazhir. Dalam kerangka ini, berbagai pelatihan dan workshop telah diadakan untuk membantu nazhir dalam mengelola dan mengembangkan aset wakaf secara produktif. Kolaborasi dengan Divisi Inklusi Keuangan Syariah sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat mengakses layanan wakaf dengan mudah dan memahami manfaatnya dalam konteks ekonomi syariah.

### **6. Sosialisasi UMKM Berbasis Zakat**

Program ini berfokus pada edukasi dan dukungan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terkait pengelolaan zakat dan sertifikasi halal. Divisi Dana Sosial Syariah bekerja sama dengan Divisi Pemberdayaan Ekonomi untuk mengintegrasikan zakat ke dalam strategi pengembangan UMKM. Program ini juga melibatkan Divisi Inklusi Keuangan Syariah untuk memastikan bahwa UMKM yang menerima dukungan juga mendapatkan akses ke layanan keuangan syariah yang dibutuhkan.

## 7. **Business Matching** untuk Nazhir dan Investor

Inisiatif ini bertujuan untuk mempertemukan nazhir dengan investor potensial. Melalui kegiatan business matching, nazhir diberikan pelatihan dalam mengelola dan mengembangkan dana wakaf serta bagaimana menarik investor untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek berbasis wakaf. Program ini berkolaborasi dengan Divisi Investasi Syariah di KNEKS untuk menciptakan platform yang mempertemukan nazhir dengan investor dan mendukung investasi yang berbasis wakaf.

## 8. **Peningkatan Kompetensi Amil melalui Sekolah Amil**

Untuk meningkatkan kompetensi amil, Forum Zakat (FOZ) menyelenggarakan program Sekolah Amil yang memberikan pelatihan komprehensif bagi pengelola zakat. Divisi Dana Sosial Syariah berkolaborasi dengan FOZ dalam merancang kurikulum dan materi pelatihan, serta bekerja sama dengan Divisi Pendidikan dan Pelatihan untuk memastikan bahwa program ini selaras dengan standar nasional dalam pengelolaan zakat.

### *Kolaborasi Pelaksanaan Program*

Dalam pelaksanaan program-program yang dilakukan pada klaster keuangan Syariah dilakukan kolaborasi baik secara internal maupun eksternal. Beberapa fokus kegiatan yang dikolaborasikan tersebut adalah sebagai berikut:

- **Digitalisasi dan Inklusi Keuangan:** Program digitalisasi yang dilakukan oleh Divisi LKMS dan Divisi Inklusi Keuangan Syariah menciptakan sinergi dalam meningkatkan akses dan literasi keuangan syariah, khususnya dalam memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan layanan keuangan syariah.
- **Edukasi dan Pengembangan SDM:** Kerjasama antara Divisi Dana Sosial Syariah dan Divisi SDM serta Divisi Pendidikan dan Pelatihan dalam program pelatihan dan sertifikasi menunjukkan upaya terpadu dalam mengembangkan kompetensi SDM di seluruh klaster keuangan sosial Islam.
- **Pengembangan UMKM:** Kolaborasi antara Divisi Dana Sosial Syariah dan Divisi Pemberdayaan Ekonomi dalam program sosialisasi zakat dan sertifikasi halal bagi UMKM menunjukkan bagaimana integrasi berbagai aspek ekonomi syariah dapat mendukung pertumbuhan UMKM.



- **Kolaborasi Eksternal:** Untuk memperkuat pengawasan dan regulasi, Divisi LKMS juga bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kolaborasi ini bertujuan untuk mengembangkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan LKMS serta memastikan bahwa LKMS memenuhi standar operasional dan manajerial yang diperlukan.

Dengan beragam program yang telah diimplementasikan, KNEKS berupaya meningkatkan kualitas SDM di sektor keuangan sosial syariah melalui pendekatan yang terkoordinasi dan kolaboratif. Upaya ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ekonomi syariah di Indonesia.

### 3.3.2. Analisis SWOT Program Pengembangan SDM EKS Klaster Keuangan Sosial Syariah

Pengembangan SDM di sektor keuangan sosial yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir perlu dianalisis secara mendalam dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan. Salah satu cara untuk melihat bagaimana perkembangan dan kondisi lapangan pengembangan SDM ini dapat dilakukan dengan analisis SWOT. Berikut adalah analisis SWOT yang merangkum kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam implementasi peta jalan SDM Syariah untuk klaster Keuangan Sosial Syariah:

Strengths	Weaknesses
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kemitraan yang Kuat</b> <i>Kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan seperti FOZ, Kemenag, dan lembaga sertifikasi telah memperkuat efektivitas program. Selain itu, kolaborasi dengan organisasi lokal dan internasional juga memberikan dukungan yang luas dan sumber daya yang cukup untuk pengembangan SDM.</i></li> <li>• <b>Pendekatan Berbasis Komunitas</b> <i>Implementasi program berbasis komunitas, seperti yang dilakukan melalui pesantren dan masjid, memfasilitasi integrasi nilai-nilai keagamaan dan lokal ke dalam program yang meningkatkan tingkat penerimaan dan keberlanjutan program.</i></li> <li>• <b>Inisiatif Digitalisasi</b> <i>Penerapan teknologi dan inisiatif digitalisasi dalam pengelolaan keuangan sosial syariah telah meningkatkan efisiensi dan transparansi. Program digitalisasi core system untuk LKMS adalah salah satu contoh dari keunggulan pada aspek ini.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ketergantungan pada Key Person</b> <i>Program sering kali sangat bergantung pada individu kunci dan indikator kinerja utama (IKU) lembaga, yang bisa menjadi hambatan dalam jangka panjang jika individu tersebut meninggalkan organisasi atau terjadi perubahan dalam struktur manajemen. Hal ini menjadi salah satu tantangan yang misalnya dihadapi oleh pengembangan inklusi keuangan Syariah di pesantren.</i></li> <li>• <b>Keterbatasan Latar Belakang SDM</b> <i>Banyak SDM yang terlibat dalam program ini tidak memiliki latar belakang keuangan yang memadai. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan pelatihan tambahan untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.</i></li> <li>• <b>Kendala Teknologi pada LKMS</b> <i>Rendahnya tingkat adopsi teknologi core system di beberapa LKMS disebabkan oleh kapasitas SDM yang terbatas dan variabilitas ukuran usaha LKMS. Hal ini menjadi tantangan dalam penerapan teknologi secara merata di seluruh LKMS.</i></li> </ul>

Opportunities	Threats
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Ekspansi Program Pelatihan dan Sertifikasi</b> <i>Ada peluang besar untuk memperluas program pelatihan dan sertifikasi bagi pengelola zakat, wakaf, dan lembaga keuangan mikro syariah. Inisiatif ini dapat meningkatkan profesionalisme dan kompetensi SDM di sektor ini.</i></li> <li>• <b>Kolaborasi Internasional</b> <i>Kerjasama dengan lembaga internasional dapat membuka kesempatan untuk memperluas wawasan dan meningkatkan kapasitas SDM lokal melalui transfer pengetahuan dan praktik terbaik dari luar negeri.</i></li> <li>• <b>Inovasi dalam Pengelolaan Dana Sosial</b> <i>Penggunaan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan zakat dan wakaf dapat menciptakan peluang baru untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional serta menarik lebih banyak partisipasi dari masyarakat.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Persepsi Negatif terhadap Keuangan Syariah</b> <i>Di beberapa komunitas, terutama di kalangan pesantren, ada persepsi bahwa bank syariah tidak berbeda dengan bank konvensional. Hal ini dapat menghambat penerimaan dan partisipasi dalam program keuangan syariah.</i></li> <li>• <b>Tantangan Implementasi di Lapangan</b> <i>Tantangan dalam menginternalisasi program di komunitas yang memiliki latar belakang dan kebutuhan yang beragam bisa menjadi hambatan signifikan. Ketidakcocokan antara pesan dan pelaksana program dengan kebutuhan komunitas dapat mengurangi efektivitas program.</i></li> <li>• <b>Ketidakpastian Regulasi</b> <i>Perubahan regulasi atau kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi stabilitas dan keberlanjutan program pengembangan SDM. Keputusan kebijakan yang tidak terduga dapat mengganggu rencana dan pelaksanaan program.</i></li> </ul>

**Figur 3.2. SWOT Matriks Klaster Keuangan Sosial Syariah**

### 3.3. Industri Halal

Ekosistem industri halal di Indonesia telah berkembang pesat, didorong oleh mayoritas populasi Muslim di negara ini. Pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah untuk memperkuat ekosistem ini, termasuk melalui pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertugas mengawasi sertifikasi halal. Pada tahun 2023, pemerintah mengeluarkan regulasi terbaru yang mewajibkan semua produk makanan, minuman, kosmetik, dan obat-obatan untuk mendapatkan sertifikasi halal sebelum 2026. Selain itu, Indonesia berupaya menjadi pusat industri halal dunia dengan mengembangkan kawasan industri halal di beberapa daerah.

Kebutuhan sumber daya manusia (SDM) dalam ekosistem industri halal di Indonesia sangat vital untuk memastikan keberlanjutan dan kualitas produk halal. Seiring dengan pertumbuhan industri ini, permintaan akan tenaga kerja terampil yang memahami prinsip-prinsip halal, seperti auditor halal, ahli teknologi pangan halal, dan manajer sertifikasi halal, semakin meningkat. Berdasarkan Peta Jalan Pengembangan SDM EKS, 2021-2024, arah pengembangan SDM dalam bidang sektor industri halal berfokus pada pengautan *halal assurance system* dari berbagai tahapan ekosistem dimana para SDM yang terlibat dapat memastikan bahwa seluruh tahapan

bisnis, baik dari proses perencanaan, eksekusi, maupun evaluasi, telah memenuhi standar halal yang berlaku.

### 3.2.1 Implementasi Program Pengembangan SDM Klaster Industri Halal

Klaster Industri Halal di KNEKS digawangi oleh tiga divisi utama sebagai inisiator maupun pelaksana program, yaitu: Divisi Pengembangan *Halal Assurance System*, Divisi Infrastruktur Industri Halal, dan Divisi Rantai Nilai Produk Halal. Sedangkan dari sisi *stakeholders* atau pemangku kepentingan utama, terutama yang berkaitan dengan pengembangan SDM bidang industri halal, meliputi Badan Pelaksana Jaminan Produk Halal (BPJPH), Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perhubungan, BI, OJK, maupun berbagai asosiasi terkait. Berdasarkan hasil FGD dan sumber informasi terkait lainnya, dapat diidentifikasi beberapa implementasi program pada klaster ini yang berkaitan dengan pengembangan SDM Ekonomi Syariah sebagai berikut:

#### 1. Percepatan Sertifikasi Halal untuk Profesi Pendukung Industri Halal

KNEKS telah meluncurkan berbagai program percepatan sertifikasi halal untuk mendukung pengembangan industri halal di Indonesia. Salah satu program utamanya adalah penyederhanaan proses sertifikasi halal melalui digitalisasi. KNEKS bekerja sama dengan BPJPH dan lembaga terkait lainnya untuk mengembangkan Sistem Informasi Halal Terpadu (SIHALAL). Platform digital ini memungkinkan perusahaan untuk mengajukan sertifikasi halal secara online, mengurangi birokrasi, dan mempercepat waktu pemrosesan. Dengan digitalisasi ini, KNEKS berharap dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses sertifikasi halal.

Selain percepatan sertifikasi halal untuk produk, KNEKS juga terus berupaya menginisiasi akselerasi program percepatan sertifikasi untuk profesi pendukung industri halal seperti untuk auditor halal, penyelia halal, pendamping proses produk halal (PPH), juru sembelih halal, dan komisi fatwa.

#### 2. Bimtek untuk UMK dan Pendamping Halal

Selain itu, KNEKS juga menginisiasi program pendampingan dan pelatihan bagi usaha mikro dan kecil (UMK). Program ini bertujuan untuk membantu UMK memahami dan memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Melalui kerja sama dengan berbagai lembaga pelatihan, universitas, dan organisasi bisnis, KNEKS menyediakan kursus, workshop, dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kapasitas UMK dalam memproduksi dan

mengelola produk halal. Program pendampingan ini tidak hanya mencakup aspek teknis dan administratif, tetapi juga memberikan dukungan dalam aspek pemasaran dan pengembangan produk, sehingga UMK dapat lebih kompetitif di pasar halal domestik dan internasional.

Selain bimbingan teknis untuk pelaku usaha, KNEKS juga memberikan bimbingan teknis bagi para pendamping halal. Program ini bertujuan untuk melatih pendamping halal yang akan membantu UMK dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Program bimtek ini memberikan pelatihan yang komprehensif kepada pendamping halal mengenai aspek teknis dan administratif dari proses sertifikasi halal. Pelatihan ini mencakup pengetahuan tentang standar halal, prosedur sertifikasi, persyaratan dokumentasi, dan teknologi produksi halal. Pendamping halal dilatih untuk membantu UMK memahami dan memenuhi semua persyaratan yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi halal.

### **3. Modul, Buku Panduan, dan Platform *e-learning* untuk UMK**

KNEKS bekerja sama dengan berbagai ahli dan lembaga pendidikan untuk menyusun modul pelatihan yang komprehensif bagi UMK. Modul ini mencakup berbagai aspek penting seperti dasar-dasar halal, prosedur sertifikasi, manajemen produksi halal, dan standar kebersihan dan keamanan pangan. Modul pelatihan ini dirancang untuk mudah dipahami oleh pelaku UMK dari berbagai latar belakang pendidikan dan pengalaman.

Selain modul pelatihan, KNEKS juga mengembangkan buku panduan praktis yang berfungsi sebagai referensi harian bagi pelaku UMK. Buku panduan ini berisi langkah-langkah praktis untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal, termasuk cara mengajukan sertifikasi, tips untuk memastikan kepatuhan terhadap standar halal, serta informasi kontak lembaga-lembaga terkait yang dapat membantu proses sertifikasi. Panduan ini didistribusikan secara luas baik dalam bentuk cetak maupun digital. Untuk memperluas jangkauan dan aksesibilitas pelatihan, KNEKS juga meluncurkan platform *e-learning* yang menyediakan kursus online bagi UMK. Platform ini menawarkan berbagai kursus yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja.

Melalui program inklusivitas dalam pembelajaran ini, KNEKS memastikan bahwa pelaku UMK di seluruh Indonesia, termasuk di daerah terpencil, memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan pelatihan yang diperlukan untuk memenuhi standar halal. Ini tidak hanya membantu UMK dalam mendapatkan sertifikasi halal, tetapi juga meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka di pasar domestik dan internasional.

#### 4. MBKM Inseri Topik Halal ke Kurikulum

Program MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) Inseri Topik Halal ke Kurikulum adalah inisiatif yang telah dilaksanakan oleh KNEKS untuk memasukkan materi tentang halal ke dalam kurikulum pendidikan tinggi di Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mahasiswa terhadap pentingnya kehalalan produk dalam konteks industri halal. Implementasi program ini melibatkan kerjasama antara KNEKS, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta perguruan tinggi di seluruh Indonesia dalam menyusun dan menyematkan modul pembelajaran tentang halal ke dalam kurikulum mata kuliah yang relevan. Salah satu output yang ada adalah Acuan Pembelajaran MBKM Industri Halal Perguruan Tinggi. Selain itu, Workshop Sinergi Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar: Kampus Merdeka (MBKM) Industri Halal di Perguruan Tinggi juga telah dilakukan untuk dapat menjadi jembatan kepada mahasiswa untuk berkiprah di industri halal.

#### 5. Persiapan Tim Manajemen untuk Pengembangan Zona Halal dalam Kawasan Industri

Program Pengembangan Zona Halal dalam Kawasan Industri adalah inisiatif yang dilakukan oleh KNEKS dan berbagai stakeholders terkait untuk menciptakan lingkungan industri yang mendukung produksi halal di Indonesia. Program ini bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip halal dalam semua aspek operasional kawasan industri, mulai dari produksi, distribusi, hingga pemasaran produk halal. Di Indonesia sudah ada beberapa kawasan industri atau zona ekonomi khusus yang diinisiasi sebagai Kawasan Industri Halal. Beberapa di antaranya termasuk: Halal Industrial Park Sidoarjo, Modern Halal Valley Cikande, dan Bintang Inti Halal Hub.

Dalam tataran operasional, tantangan utama dari zona halal adalah masih sangat terbatasnya SDM yang memahami proses hulu ke hilir terkait logistik halal yang memerlukan tahapan operasional yang sangat spesifik. Dengan demikian, pelatihan SDM sangat diperlukan dan hingga saat ini beberapa pelatihan SDM masih lebih banyak mengacu pada LPPOM karena masih menunggu *guidelines* yang lebih terperinci dari BPJPH.

##### *Kolaborasi Pelaksanaan Program*

Terdapat beragam program pengembangan SDM EKS industri halal yang merupakan hasil kolaborasi internal antar divisi KNEKS maupun dengan berbagai mitra strategis KNEKS misalnya Kementerian Perindustrian, BPJPH, BI. Berbagai program kolaboratif tersebut mayoritas merupakan program pengembangan SDM industri halal yang terkait

dengan sertifikasi halal yang diberikan baik kepada pelaku usaha maupun kepada PPH. KNEKS memberikan berbagai dukungan terhadap pengembangan SDM di klaster ini baik sebagai pihak inisiator maupun eksekutor. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan tujuan dan target yang ingin dicapai oleh berbagai stakeholders.

### 3.3.2. Analisis SWOT Program Pengembangan SDM EKS Klaster Industri Halal

Berikut ini adalah analisis SWOT yang mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam implementasi peta jalan SDM EKS untuk klaster Industri halal.

Strengths	Weaknesses
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Kolaborasi dan kemitraan yang baik dengan stakeholders</b> <i>Kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan seperti BPJPH, Kementerian Industri, serta berbagai asosiasi membuat program yang ada menjadi lebih sinkron.</i></li> <li>• <b>Utilitasi digitalisasi yang memadai</b> <i>Dalam aspek penyebaran informasi dan pengetahuan, dimanfaatkan berbagai platform digital turut mempercepat proses knowledge spillover serta memperluas keterjangkauan akses informasi kepada para penerima manfaat.</i></li> <li>• <b>Inisiasi integrasi dengan kurikulum pendidikan</b> <i>Berbagai macam program kolaborasi antara industri dan instansi pendidikan tinggi telah dilakukan untuk memastikan bahwa kurikulum pendidikan sejalan dengan kebutuhan industri.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Birokrasi yang cukup kompleks (banyak stakeholders yang terlibat)</b> <i>Banyak SDM yang terlibat dalam program ini tidak memiliki latar belakang keuangan yang memadai. Hal ini menimbulkan kebutuhan akan pelatihan tambahan untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan.</i></li> <li>• <b>Keterbatasan latar belakang dan kualifikasi dari SDM pelaksana</b> <i>Dari segi kuantitas maupun kapabilitas, SDM pelaksana yang menguasai tataran operasionalisasi sektor industri halal dari hulu ke hilir masih sangat terbatas.</i></li> </ul>
Opportunities	Threats
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Regulasi sudah terstandarisasi (e.g. HAS)</b> <i>Regulasi terkait standar operasional eksositem industri halal sudah bisa merujuk pada berbagai standarisasi di level internasional maupun nasional.</i></li> <li>• <b>Efek kuat dari asosiasi / komunitas</b> <i>Pembinaan berbasis community-based meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Maintaining keaktifan pendamping PPH</b> <i>Salah satu tantangan terbesar dalam proses sertifikasi halal adalah dalam membina komitmen dan keaktifan para pendamping PPH karena mereka merupakan salah satu backbone dari keberhasilan program.</i></li> <li>• <b>Regulasi terbatas untuk halal logistic &amp; ports</b> <i>Regulasi yang ada terkait dengan kompetensi SDM terutama untuk pengelola Kawasan Industri Hala masih terbatas untuk halal logistics and ports.</i></li> </ul>

Figur 3.3. SWOT Matriks Klaster Industri Halal

### 3.4. Bisnis dan Kewirausahaan Syariah

Sektor bisnis dan kewirausahaan syariah memegang peran sentral dalam ekosistem ekonomi syariah. Klaster ini mendorong pengembangan usaha yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah dan mendukung pertumbuhan wirausaha yang patuh pada nilai-nilai Islam. Bisnis dan kewirausahaan syariah tidak hanya fokus pada penciptaan keuntungan finansial tetapi juga pada kontribusi sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.

Berdasarkan peta jalan pengembangan SDM Eksyar 2021-2024, terdapat beberapa arah kebijakan pembangunan untuk sektor bisnis dan kewirausahaan syariah, yang meliputi empat program kerja utama: Program pembinaan dan peningkatan skala usaha UMK Halal Nasional; IPO usaha syariah dan penerbitan *corporate sukuk*; Inkubasi eksportir produk halal dan kemitraan dengan usaha besar; Akselerasi digitalisasi informasi dan usaha syariah; Pendirian pusat data ekonomi syariah Indonesia.

Peta jalan ini juga mengidentifikasi sejumlah pemangku kepentingan utama dalam pengembangan SDM di sektor ini, termasuk KNEKS, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, asosiasi industri halal, dan pelaku usaha syariah. Para pemangku kepentingan ini memainkan peran penting dalam mendukung dan memfasilitasi pertumbuhan bisnis dan kewirausahaan syariah di Indonesia. KNEKS memiliki peran strategis dalam mendorong inisiatif dan program yang memperkuat ekosistem bisnis syariah, baik melalui pelatihan dan pendidikan, promosi dan pemasaran, maupun penguatan regulasi yang mendukung bisnis syariah.

#### 3.4.1. Implementasi Program Pengembangan SDM Bisnis dan Kewirausahaan Syariah

Klaster Bisnis dan Kewirausahaan Syariah di bawah KNEKS memiliki tiga divisi utama dalam pengembangan dan pelaksanaan program: Divisi Kemitraan dan Akselerasi Usaha Syariah, Divisi Inkubasi Bisnis Syariah, dan Divisi Bisnis Digital dan Pusat Data Ekonomi Syariah. Setiap divisi memiliki peran penting dalam koordinasi dan eksekusi program bisnis kewirausahaan dan bisnis termasuk pada peningkatan SDM di bidang ini. Berdasarkan hasil FGD dan sumber informasi terkait lainnya, maka dapat diidentifikasi beberapa implementasi program di klaster ini termasuk beberapa program yang berkaitan yang berkaitan dengan pengembangan SDM Ekonomi Syariah sebagai berikut:

##### 1. Pengembangan Pusat Data Ekonomi Syariah

Fokus utama program ini adalah pengembangan Pusat Data Ekonomi Syariah (PDES) yang berperan dalam menyediakan akses ke data penting yang mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Implementasi dari program ini telah menghasilkan

penyediaan dashboard pusat data yang memungkinkan akses dan analisis data oleh berbagai pemangku kepentingan. Program ini juga berhasil memetakan sumber daya bisnis ekonomi syariah, yang merupakan langkah penting dalam membangun arsitektur bisnis yang lebih terstruktur dan efisien. Namun, program ini masih menghadapi tantangan dalam hal jumlah SDM yang terbatas, belum adanya Grand Design yang jelas, serta hambatan birokrasi yang memperlambat koordinasi antar K/L.

## **2. Pengembangan Perhitungan Produk Domestik Bruto (PDB) Syariah**

Program ini berupaya mengembangkan metodologi untuk menghitung Produk Domestik Bruto (PDB) Syariah berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Dalam upaya ini, beberapa klaster industri halal seperti makanan dan minuman telah diidentifikasi sebagai target awal dengan rencana untuk memperluas identifikasi ke lebih banyak klaster.

## **3. Program Literasi dan Edukasi melalui modul *crowdfunding and workshop business matching***

Untuk meningkatkan literasi dan akses UMKM terhadap pendanaan syariah, diluncurkan program yang terdiri dari dua program yaitu modul *crowdfunding* dan *workshop business matching*. Modul *Crowdfunding* dilakukan untuk memperluas akses pendanaan bagi UMKM, program ini mengembangkan modul edukatif khusus yang menjelaskan konsep dan mekanisme crowdfunding syariah. Modul ini dirancang untuk membantu investor dan penerbit memahami cara kerja *platform crowdfunding* serta bagaimana mereka dapat mendukung UMKM secara efektif dan sesuai dengan prinsip syariah. Melalui pengetahuan ini, diharapkan UMKM dapat lebih mudah mendapatkan pendanaan dari masyarakat luas tanpa harus bergantung pada sumber pembiayaan tradisional. Sementara itu *Workshop Business Matching* dilakukan sebagai kelanjutan dari pengembangan modul *crowdfunding*, program ini mengadakan serangkaian workshop yang bertujuan untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan pemahaman tentang *crowdfunding* syariah. Selain presentasi modul, workshop ini juga mencakup sesi *business matching*, di mana UMKM dapat bertemu langsung dengan calon investor dan mitra bisnis potensial. Interaksi ini membuka peluang bagi UMKM untuk menjalin kerjasama yang produktif dan mendapatkan pendanaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.



#### **4. Pendampingan Akses Pembiayaan**

Untuk meningkatkan akses UMKM terhadap pembiayaan maka dilakukan proses pendampingan dengan dua kegiatan utama yaitu pemberian modul dan pendampingan usaha. Modul Pembiayaan Syariah ditujukan untuk membantu UMKM memahami mekanisme dan produk-produk pembiayaan syariah yang tersedia. Modul ini dirancang dengan bahasa yang mudah dipahami sehingga dapat diakses oleh berbagai kalangan pelaku UMKM. Sedangkan peran pendampingan dilakukan untuk memastikan UMKM dapat memanfaatkan modul dengan baik, program ini juga melibatkan pelatihan bagi pendamping UMKM.

#### **5. Pelatihan Ekspor**

Program Percepatan Ekspor dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing dan memperluas pasar UMKM di kancah internasional, program ini berkolaborasi dengan Kelompok Kerja Ekspor di bawah Direktorat Jenderal Perdagangan untuk menyediakan pelatihan intensif dan dukungan praktis bagi UMKM. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek ekspor seperti strategi pemasaran global, persiapan dokumen ekspor, serta teknik bernegosiasi dengan pembeli dari luar negeri. Melalui program ini, UMKM dipersiapkan dengan baik untuk menembus pasar internasional dan memanfaatkan peluang ekspor yang ada.

##### *Kolaborasi Pelaksanaan Program*

Program pengembangan SDM EKS klaster bisnis dan kewirausahaan Syariah yang diidentifikasi merupakan hasil kolaborasi internal atau eksternal KNEKS. KNEKS memberikan berbagai dukungan terhadap pengembangan SDM di klaster ini baik sebagai pihak pendukung maupun inisiator. Program pengembangan SDM di klaster ini juga telah dilakukan dan melibatkan lembaga lain seperti Bank Indonesia dan berbagai kementerian seperti Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Hal ini menunjukkan adanya keselarasan tujuan dan target yang ingin dicapai oleh berbagai stakeholders terkait.

#### **3.4.2. Analisis SWOT Pengembangan SDM Eksyar Klaster Bisnis dan Kewirausahaan Syariah**

Analisis SWOT berikut memberikan gambaran tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam pengembangan SDM untuk klaster Bisnis dan Kewirausahaan Syariah.

Strengths	Weaknesses
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Akses ke Data yang Luas</b> <i>Program PDES menyediakan akses ke data ekonomi syariah dari berbagai K/L, yang merupakan dasar untuk analisis dan pengambilan keputusan.</i></li> <li>• <b>Program Edukasi yang Komprehensif</b> <i>Berbagai modul dan pelatihan yang disediakan untuk UMKM meningkatkan kapasitas dan kesiapan mereka untuk bersaing di pasar syariah dan global.</i></li> <li>• <b>Kolaborasi dan Kemitraan</b> <i>Kerjasama dengan instansi seperti Kemendag dan KADIN memperkuat dukungan untuk UMKM.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Keterbatasan SDM dan Kapasitas Internal</b> <i>Kekurangan jumlah SDM dan kebutuhan akan peningkatan kapasitas internal menjadi hambatan dalam pelaksanaan program.</i></li> <li>• <b>Koordinasi Birokrasi</b> <i>Hambatan birokrasi dalam koordinasi antar K/L dapat memperlambat implementasi dan efektivitas program.</i></li> <li>• <b>Keterlibatan Stakeholders</b> <i>Keterlibatan yang masih kurang dari stakeholders utama, terutama dalam hal dukungan operasional dan komitmen pelaksanaan.</i></li> </ul>
Opportunities	Threats
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Digitalisasi sebagai Enabler</b> <i>Pengembangan lebih lanjut dari MEKSI 2 dapat memanfaatkan digitalisasi untuk mempercepat dan meningkatkan efektivitas program.</i></li> <li>• <b>Ekspansi Program Edukasi</b> <i>Peluang untuk memperluas program pelatihan dan literasi keuangan syariah ke lebih banyak UMKM.</i></li> <li>• <b>Potensi Pasar Global</b> <i>Program percepatan ekspor dapat membuka peluang besar bagi UMKM untuk memasuki pasar internasional.</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Perubahan Regulasi</b> <i>Ketidakpastian dalam regulasi atau kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi stabilitas dan keberlanjutan program.</i></li> <li>• <b>Resistensi terhadap Perubahan</b> <i>UMKM yang masih berorientasi pada keuntungan jangka pendek dan resistensi terhadap pembiayaan syariah dapat menghambat partisipasi.</i></li> <li>• <b>Isu Legalitas dan Tata Kelola</b> <i>Perlu perbaikan dalam tata kelola dan legalitas UMKM untuk memastikan mereka dapat memanfaatkan sepenuhnya program pembiayaan syariah.</i></li> </ul>

**Figur 3.4. SWOT Matriks Kluster Bisnis dan Kewirausahaan Syariah**

## BAB 4. EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM PETA JALAN SDM EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH

4.1. Catatan Kritis dan Poin Evaluasi Implementasi Peta Jalan SDM EKS berdasarkan Klaster  
 Dari hasil evaluasi berdasarkan analisis SWOT per klaster, terdapat beberapa catatan kritis dan poin evaluasi yang dapat menjadi landasan perbaikan implementasi yang telah berjalan.

**Tabel 5.1. Poin Evaluasi Implementasi Program Pengembangan SDM per Klaster**

Klaster	Catatan Kritis dan Poin Evaluasi
Keuangan Komersial Syariah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Urgensi <i>Mismatch Mapping</i> untuk SDM dan Kebutuhan Industri</b>                      Untuk meningkatkan kualifikasi SDM pelaksana yang tepat sasaran sesuai kebutuhan industri maka pemetaan <i>mismatch mapping</i> perlu dilakukan. Ketika pemetaan sudah dilakukan maka berikutnya adalah bagaimana membentuk <i>supply side</i> dari SDM EKS agar memiliki kompetensi yang dibutuhkan, salah satunya melalui pendidikan tinggi. Hal ini dapat dilakukan melalui inisiasi program beasiswa EKS misalnya melalui LPDP, MCPS IsDB.</li> <li>2. <b>Peningkatan Kualitas Lulusan Perguruan Tinggi pada Bidang EKS</b>                      Perguruan Tinggi yang memiliki program studi terkait EKS perlu untuk terus melakukan <i>updating</i> kurikulum dan konteks pembelajaran untuk terus dapat sejalan dengan arah pengembangan industri keuangan komersial syariah. Sebagai contoh konvergensi EKS dengan agenda pembangunan seperti <i>sustainable finance, green and blue economy</i> perlu untuk menjadi diinsersi dalam kurikulum terkait. Contoh lain, dalam bidang perbankan syariah, arah perbankan syariah menuju <i>investment banking</i> juga perlu untuk menjadi perhatian dari pengelola program studi untuk dapat menyesuaikan konten pembelajaran dalam berbagai mata kuliah terkait.</li> <li>3. <b>Edukasi dan Literasi EKS untuk Pendidikan Menengah dan Pendidikan Dini</b>                      Literasi EKS yang masih terbatas disusul dengan tingkat acceptance yang rendah terhadap produk-produk baru keuangan komersial syariah mengindikasikan bahwa edukasi dan literasi EKS perlu dilakukan lebih dini.</li> </ol>
Keuangan Sosial Syariah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Peningkatan Kapasitas SDM</b>                      Upaya terus menerus diperlukan untuk mengembangkan kompetensi SDM melalui pelatihan, sertifikasi, dan program pendidikan berkelanjutan. Fokus pada peningkatan pengetahuan teknis dan manajerial sangat penting untuk menghadapi tantangan di masa depan.</li> <li>2. <b>Penguatan dan Kejelasan Regulasi, Kolaborasi, dan Koordinasi</b>                      Membangun kemitraan yang lebih kuat dengan lembaga internasional dan sekoctr swasta dapat memperkaya program dan sumber daya. Kolaborasi dengan berbagai pihak akan memperluas jaringan dukungan dan akses ke sumber daya yang lebih beragam. Selain itu regulasi pendukung juga harus dikuatkan dan diperjelas. Koordinasi dan wewenang antar lembaga untuk mencapai tujuan pengembangan SDM Syariah juga harus menjadi perhatian penting dalam rangka meningkatkan efektivitas program yang dilaksanakan.</li> <li>3. <b>Optimalisasi Penggunaan Teknologi dan Digitalisasi</b>                      Meningkatkan adopsi dan penggunaan teknologi dalam pengelolaan keuangan sosial syariah adalah kunci untuk mendukung efisiensi</li> </ol>

Klaster	Catatan Kritis dan Poin Evaluasi
	<p>dan akuntabilitas. Inisiatif digitalisasi harus terus didorong dan diperluas ke seluruh sektor.</p> <p><b>4. Peningkatan Kesadaran dan Edukasi</b> Upaya untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi mengenai pentingnya keuangan syariah harus diperkuat. Kampanye yang efektif untuk mengubah persepsi negatif dan meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah akan sangat penting.</p>
<b>Industri Halal</b>	<p><b>1. Urgensi Mapping Tahapan Kewajiban Sertifikasi Halal &amp; Kebutuhan SDM</b> Dalam proses pengembangan ekosistem industri halal, kebutuhan kualifikasi SDM Industri Halal akan sangat bergantung pada tahapan sertifikasi halal yang sedang ditargetkan pada periode tersebut. Dengan demikian, <i>mapping</i> kebutuhan SDM industri halal berdasarkan tahapan sertifikasi halal perlu dilakukan dan diintegrasikan terutama dengan BPJPH selaku pemangku utama. Pemetaan kompetensi tersebut perlu dilakukan dengan pendekatan generik dan spesifik.</p> <p><b>2. Urgensi Regulasi untuk Infrastruktur SDM yang Bergerak dalam Bidang Infrastruktur Industri Halal</b> Hingga saat ini belum ada SPJPH untuk halal <i>port &amp; logistic</i> sehingga <i>benchmark</i> standarisasi umum.</p> <p><b>3. Penguatan Kapasitas SDM yang Bergerak dalam Bidang Infrastruktur Industri Halal</b> Penguatan kapasitas SDM yang bergerak dalam bidang infrastruktur industri halal, seperti tim manajemen di Kawasan Industri Halal, Halal Logistic, dan Port, menjadi kunci untuk memastikan pengelolaan yang profesional dan efisien. SDM yang kompeten akan mampu menjalankan operasional yang sesuai dengan standar global dan prinsip syariah, sekaligus meningkatkan daya saing produk halal Indonesia di pasar internasional. Selain itu, penguatan ini juga mencakup pelatihan khusus di bidang teknologi digital untuk mendukung digitalisasi rantai pasok halal dan memastikan transparansi dalam sertifikasi halal.</p> <p><b>4. Literasi Mengemai Halal Awareness</b> Guna menyeimbangkan antara <i>supply &amp; demand</i> dari produk industri halal, proses literasi perlu dilakukan agar masyarakat lebih memahami tentang seluk beluk produk halal yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan minat terhadap pembelian produk halal. Selain itu, literasi ini juga diperlukan untuk meminimalisir segregasi antara industri keuangan syariah dan industri halal.</p>
<b>Bisnis dan Kewirausahaan Syariah</b>	<p><b>1. Peningkatan Kapasitas SDM</b> Perlu upaya yang berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas SDM di kedua divisi, termasuk pelatihan tambahan dan peningkatan jumlah SDM untuk mendukung operasional dan implementasi program.</p> <p><b>2. Penguatan Koordinasi, Kolaborasi dan Regulasi Pendukung</b> Perlu memperkuat koordinasi antar K/L untuk mengatasi hambatan birokrasi dan memastikan pelaksanaan program yang lebih efektif. Selain itu perlu ditingkatkan kolaborasi dengan stakeholders utama seperti Kemenkop, asosiasi pengusaha, dan KADIN untuk memperkuat dukungan kepada UMKM. Koordinasi dan kolaborasi yang baik juga memerlukan regulasi pendukung.</p> <p><b>3. Digitalisasi dan Inovasi</b></p>

Klaster	Catatan Kritis dan Poin Evaluasi
	<p>Memanfaatkan teknologi digital untuk mengoptimalkan pengumpulan dan analisis data ekonomi syariah serta meningkatkan efisiensi dalam pelaksanaan program.</p> <p><b>4. Peningkatan Legalitas dan Tata Kelola UMKM</b> Fokus pada perbaikan tata kelola dan legalitas UMKM untuk memastikan mereka memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk mengakses pembiayaan syariah dan program-program pendukung lainnya.</p>

Dari berbagai poin evaluasi implementasi program pengembangan SDM EKS per klaster tersebut, terdapat empat aspek utama yang juga dapat dijadikan sebagai landasan evaluasi. Empat aspek utama tersebut mencakup:

- 1) Regulasi
- 2) SDM Pelaksana
- 3) Keterlibatan Stakeholders
- 4) Ekosistem Pendukung

**Tabel 5.2. Evaluasi Program Pengembangan EKS Berdasarkan Aspek Regulasi, SDM Pelaksana, Keterlibatan Stakeholders, dan Ekosistem Pendukung**

	Keuangan Komersial Syariah	Keuangan Sosial Syariah	Industri Halal	Kewirausahaan dan Bisnis Syariah
<b>Regulasi</b>	- Pada mayoritas program utama regulasi sudah sangat jelas sehingga hampir tidak ada isu pada aspek ini	- Belum tersedianya regulasi yang lengkap dan detail terkait pengembangan sektor keuangan sosial dan Kebutuhan SDMya - KNEKS sebagai penggerak pengembangan EKS termasuk pengembangan SDM memiliki keterbatasan wewenang yang biasanya akan sangat berpengaruh terhadap	- Belum terdapat regulasi yang lengkap terutama terkait infrastruktur pendukung industri halal sehingga berdampak pada standarisasi sistem dan SDM yang dibutuhkan	- Perlu adanya Keterhubungan antara aturan yang ada dengan peraturan pendukung dalam pengembangan SDM syariah. - Perlu adanya aturan terkait kejelasan peran masing-masing stakeholders dalam pengembangan ekosistem maupun SDM Kewirausahaan Syariah - Perlu adanya aturan yang dapat

	Keuangan Komersial Syariah	Keuangan Sosial Syariah	Industri Halal	Kewirausahaan dan Bisnis Syariah
		sustainability program. Sehingga diperlukan aturan yang jelas		meningkatkan daya tarik masyarakat untuk menjadi wirausaha syariah
<b>SDM Pelaksana</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pada beberapa program, kemampuan teknis dari SDM pelaksana masih terbatas sehingga diperlukan <i>capacity building</i></li> <li>- Kualifikasi lulusan Perguruan Tinggi perlu untuk lebih relevan dengan kebutuhan industry</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM Pelaksana pengembangan belum terkoodinir dengan baik. Masih berdasarkan kebutuhan masing-masing insititusi</li> <li>- Keterhubungan antara dunia Pendidikan dan industri/instusi belum optimal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SDM yang bergerak pada bidang infrastruktur industri halal masih memiliki kapasitas yang terbatas mengenai sistem halal assurance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat tantangan dalam mendikotomikan antara wirausaha Syariah dan bukan Syariah, sehingga dalam pelaksanaanya kurang optimal dalam mengkoordinasikan SDM yang melaksanakan maupun yang ditargetkan</li> </ul>
<b>Keterlibatan Stakeholders</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stakeholders sudah memiliki program masing-masing terkait dengan capacity building maupun literasi, akan lebih baik jika terdapat harmonisasi program</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterlibatan masih di dominasi oleh <i>direct</i> stakeholders</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cakupan stakeholders yang sangat luas menjadi tantangan tersendiri dalam harmonisasi program</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi program penciptaan SDM Kewirausahaan Syariah belum dilakukan secara terpadu dan masif antar stakeholders</li> </ul>
<b>Ekosistem Pendukung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ekosistem pendukung untuk klaster keuangan syariah merupakan salah satu yang paling firm</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih kurangnya keterpaduan baik secara institutional maupun peraturan yang dapat mendorong pengembangan sektor secara optimal</li> <li>- Belum adanya pendekatan yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Edukasi dan literasi mengenai halal lifestyle diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara supply dan demand</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Brand Syariah masih dianggap belum memiliki nilai tambah yang signifikan untuk bisnis. Sehingga secara ekosistem sistem implementasi kewirausahaan Syariah masih</li> </ul>

	Keuangan Komersial Syariah	Keuangan Sosial Syariah	Industri Halal	Kewirausahaan dan Bisnis Syariah
		jelas terkait daya dorong antara perkembangan sektor dengan peningkatan kualitas dan kapasitas SDM		didominasi motivasi yang tidakimbang antara motivasi material dan non-material

Secara internal, mayoritas program pengembangan SDM EKS yang dilaksanakan oleh KNEKS dilakukan *embedded* dengan program prioritas yang berjalan sehingga tidak ada program terpisah yang dikhususkan untuk pengembangan SDM EKS. Bentuk *embedded program* pengembangan SDM secara umum meliputi:

- a) Sosialisasi, literasi dan edukasi kepada publik  
Kegiatan sosialisasi, literasi, dan edukasi biasanya lebih ditujukan kepada publik secara umum dengan sudut pandang yang lebih bersifat *demand side* sehingga berbagai produk dan layanan keuangan syariah maupun industri halal yang tersedia dapat diterima dengan baik oleh masyarakat secara umum.
- b) Bimbingan teknis  
Kegiatan pelatihan atau pendampingan yang lebih spesifik, berfokus pada aspek teknis atau operasional. Dalam proses bimbingan teknis ini biasanya disediakan juga referensi bagi peserta berupa modul atau panduan teknis
- c) *Capacity building* kepada SDM pelaksana  
Jika bimbingan teknis bersifat lebih spesifik maka *capacity building* bersifat lebih strategis dan menyeluruh, mencakup analisis kebutuhan, rencana pengembangan, dan implementasi berkelanjutan

#### 4.2. Kebutuhan akan Pendekatan Pengembangan SDM EKS yang Tepat

Dari hasil evaluasi implementasi Peta Jalan Pengembangan SDM Ekonomi dan Keuangan Syariah 2021-2024 yang telah dijabarkan di atas memberikan gambaran yang cukup komprehensif tentang capaian, tantangan dan peluang pengembangan SDM Eksyar dalam beberapa tahun terakhir. Hasil analisis SWOT, pemetaan catatan kritis dan pencermatan pada pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan memperlihatkan beberapa isu strategis yang perlu diperhatikan dan menjadi dasar bagi penyusunan arah kebijakan dan program kedepan.

Perlu diakui bahwa implementasi peta jalan SDM Eksyar dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan beberapa keberhasilan yang diapresiasi seperti adanya penguatan kapasitas,

terbangunnya kolaborasi lintas sektor yang melibatkan stakeholders seperti kementerian, lembaga, asosiasi, dan perguruan tinggi dan terjadinya adopsi teknologi. Hal ini telah memberikan dampak pada penguatan efektivitas program seperti penguatan literasi dan sertifikasi SDM, peningkatan digitalisasi dan lahirnya inisiatif berbasis komunitas dalam pengembangan Eksyar seperti pesantren dan masjid.

Namun, tidak dapat dinafikan bahwa masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat optimalisasi dan efektivitas pengembangan program diantaranya keterbatasan SDM yang kompeten, hambatan birokrasi dan kesenjangan terhadap akses teknologi. Analisis SWOT untuk masing-masing klaster yang telah dilakukan memberikan beberapa kesimpulan umum. Kekuatan utama pengembangan SDM Eksyar secara umum terletak pada potensi kolaborasi yang dapat dilakukan antar sektor, sudah adanya beberapa regulasi dan eksisting program di beberapa institusi, walaupun terdapat indikasi bahwa pada beberapa aspek dan lembaga masih terdapat ketergantungan pada sosok atau lembaga penanggung jawab, latar belakang SDM pengembang yang belum kuat, konsistensi pengembangan yang belum konsisten dan kurangnya wewenang dan regulasi yang dapat memperkuat koordinasi kelembagaan. Di satu sisi pengembangan SDM harusnya dapat mengoptimalkan peluang dari adanya kegiatan pelatihan dan sertifikasi yang masif secara nasional, peluarng kolaborasi internasional serta mulai munculnya berbagai inovasi pengembangan ekonomi Syariah secara umum. Walaupun optimalisasi peluang ini sering terganggu dengan adanya perubahan regulasi yang tidak terduga atau belum settle, adanya resistensi terhadap Eksyar dan persepsi negated terhadap eksyar di beberapa pihak atau kalangan.

Hal ini yang melandasi adanya catatan kritis bahwa keberhasilan program SDM Eksyar secara spesifik tidak dapat hanya diukur dari output jangka pendek seperti pelatihan dan sertifikasi, tetapi juga harus dilihat melalui dampak jangka panjang seperti peningkatan daya saing SDM, partisipasi masyarakat dalam ekosistem ekonomi Syariah, kesinambungan program dan peran yang dapat diambil oleh Eksyar terhadap pembangunan nasional secara umum. Oleh karena itu, untuk menghadapi tantangan pengembangan SDM Eksyar ini diperlukan formulasi pendekatan strategis yang mengedepankan prinsip-prinsip efektivitas, efisiensi, wewenang, dampak berkelanjutan, dan kesinambungan program. Hal ini sangat perlu untuk memastikan bahwa program yang dirancang tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek tetapi juga mampu menciptakan transformasi jangka panjang.

Dalam hal ini dibutuhkan skenario pengembangan SDM Eksyar yang mampu mengakomodir kepentingan untuk penguatan kolaborasi lintas sektor dengan menciptakan ekosistem yang mendukung sinergi antara berbagai aktor seperti pemerintah, pihak swasta, pelaksana



pendidikan, dan masyarakat umum. Selain itu juga diperlukan pendekatan yang memastikan optimalisasi komunitas seperti pesantren, masjid dan komunitas lainnya yang dapat meningkatkan inklusi EKS. Selain itu, pendekatan pengembangan SDM EKS juga diharapkan mampu untuk mengoptimalkan penguatan teknologi dan digitalisasi sehingga mampu membuat program pengembangan SDM EKS ke seluruh lapisan masyarakat.

Di sisi lain, dengan adanya beberapa kebutuhan untuk pengembangan program spesifik prioritas yang membutuhkan dukungan ekstra maka juga dibutuhkan pendekatan pengembangan SDM EKS yang dapat memberikan dampak langsung dan cepat terhadap peningkatan kualitas SDM seperti sertifikasi berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di sektor Syariah. Selain itu akselerasi regulasi dan kebijakan yang mendukung pengembangan klaster prioritas, serta kebijakan-kebijakan diskresi juga diperlukan.

Pendekatan pengembangan SDM EKS harus menjamin efektivitas dan keberlanjutan dari program. Efektivitas dapat dicapai dengan memastikan adanya sistem monitoring dan evaluasi secara regular dan berbasis data yang akuntabel. Sementara itu keberlanjutan program memerlukan dukungan kelembagaan kuat dan adaptif, pendanaan yang berkelanjutan dan partisipasi dari stakeholder yang menyeluruh. Selain itu dengan melihat dinamika global yang terjadi saat ini pendekatan pengembangan SDM EKS juga perlu berorientasi pada peningkatan daya saing global meliputi adopsi teknologi baru, standarisasi kompetisi global dan mendorong adanya kolaborasi internasional.

Dengan demikian pendekatan pengembangan SDM yang tepat yang mampu memberikan ruang untuk optimalisasi potensi, memberikan fleksibilitas, menjamin terciptanya efektivitas dan efisiensi program serta adanya sistem pengikat yang kuat dan menyatukan merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Sehingga mampu untuk mencapai tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM sekaligus menciptakan ekosistem EKS yang berdampak baik secara nasional dan global.

## BAB 5. REKOMENDASI ARAH KEBIJAKAN KE DEPAN

Dalam berbagai dokumen perencanaan pengembangan sektor ekonomi dan keuangan syariah pada berbagai sektor yang ada pada saat ini, Sumber Daya Manusia diposisikan sebagai *enabler* dalam pencapaian visi maupun target capaian dan pengembangan sektoral. Hal ini berimplikasi pada masih sangat terbatasnya program yang memang didedikasikan secara khusus untuk pengembangan SDM EKS dari hulu ke hilir.

**Tabel 5.1. Posisi SDM EKS dalam Berbagai Dokumen Perencanaan Pengembangan EKS Nasional**

Dokumen Perencanaan EKS Nasional	Posisi SDM	Rencana Aksi Utama Terkait SDM
<b>Masterplan Ekonomi dan Keuangan Syariah (MEKSI) 2019 - 2024</b>	Strategi Dasar: Literasi, sumber daya manusia, riset dan pengembangan	Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM dan R&D ekonomi syariah, baik di lembaga pendidikan, lembaga sosial-keagamaan maupun lembaga ekonomi dan keuangan syariah
<b>Masterplan Industri Halal Indonesia (MIPHI)</b>	Program utama di bawah strategi utama “Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing”	Program utama: Pengembangan SDM yang Unggul dan Mampu Berdaya Saing (salah satunya melalui pendidikan, sertifikasi profesi, dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri)
<b>Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia 2023 - 2027</b>	<i>Enabler:</i> Infrastruktur (Teknologi dan Sumber Daya)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perubahan paradigma pemegang saham, eksekutif, dan Sumber Daya Manusia (SDM) bankir syariah ataupun pengawas perbankan syariah menuju penguatan karakteristik perbankan syariah.</li> <li>• Peningkatan kapasitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik regulator ataupun praktisi industri perbankan syariah.</li> </ul>
<b>Roadmap Pengembangan dan Penguatan Industri BPR dan BPR Syariah 2024 - 2027</b>	<i>Enabler:</i> Kuantitas dan Kualitas SDM	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyelarasan peraturan mengenai pengembangan kualitas SDM BPR dan BPRS dengan UU P2SK</li> <li>• Peningkatan kompetensi SDM BPR dan BPRS terutama terkait isu terkini pada sektor keuangan (e.g. pengembangan produk dan layanan perbankan, digitalisasi, dll)</li> </ul>

Dokumen Perencanaan EKS Nasional	Posisi SDM	Rencana Aksi Utama Terkait SDM
Roadmap Pasar Modal Syariah	Program: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Peran dan Kapasitas Kelembagaan Syariah di Pasar Modal</li> <li>• Literasi dan Inklusi kepada Masyarakat mengenai Pasar Modal Syariah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kapasitas melalui <i>workshop</i> (penyelenggaraan <i>workshop</i> kepada pelaku pasar modal syariah, antara lain calon penerbit efek syariah, WMI, WAPERD, WPPE, WPEE, corporate secretary, dan pelaku pasar modal lainnya)</li> <li>• Peningkatan kompetensi kesyariahan SDM di pasar modal</li> <li>• Implementasi modul pasar modal syariah di perguruan tinggi dalam skala nasional</li> <li>• Melakukan kolaborasi dalam pelaksanaan training of trainers (ToT) pasar modal syariah</li> <li>• Melakukan sinergi dengan pelaku pasar dalam meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal syariah</li> <li>• Berkolaborasi dengan pemangkg kepentingan dalam memasyarakatkan pasar modal syariah</li> </ul>
Rencana Strategi Bisnis Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 2020 - 2024	Isu Strategis Kelembagaan dan SDM	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan layanan dan pengawasan JPH.

Pada era pemerintahan baru, peran ekonomi dan keuangan syariah terhadap perekonomian nasional diharapkan dapat lebih nyata. Hal ini merujuk pada arah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang resmi dimulai pada Oktober 2024 yang termaktub dalam Asta Cita, peran ekonomi syariah secara eksplisit dinyatakan dalam Misi Cita 2 yang berbunyi:

*“Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru”.*

Dalam hal ini, ekonomi dan keuangan syariah melalui berbagai sektor dan instrumennya diharapkan mampu meningkatkan kapasitasnya dalam mendorong kemandirian bangsa terutama dalam hal kemandirian secara ekonomi yang menjadi salah satu agenda pembangunan pemerintahan baru. Asta Cita juga secara tegas mengarahkan sektor-sektor EKS yang secara spesifik akan memainkan peran. Sektor yang secara eksplisit disebutkan dalam Asta Cita adalah keuangan sosial syariah (bank wakaf), keuangan haji, industri farmasi halal (untuk vaksin halal), dan industri halal secara umum (dalam hal peningkatan kualitas ekosistem dari hulu ke hilir).

**Figur 5.1. Asta Cita dan Positioning Ekonomi dan Keuangan Syariah**



Sumber: KNEKS (2024)

Dengan posisi EKS dan sektoral yang semakin terang benderang, maka implikasi logis dari arah pengembangan ini tidak bisa lepas dari pengembangan kualifikasi dan kapasitas SDM yang terkait. Dari hasil Monitoring dan Evaluasi terhadap Arah Peta Jalan Pengembangan SDM Unggul 2021-2024, yang telah dikoordinasikan oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), maka terdapat beberapa rekomendasi utama untuk memperkuat pengembangan SDM ekonomi syariah di Indonesia. Rekomendasi ini diharapkan dapat memberikan panduan yang efektif bagi langkah-langkah pengembangan SDM Eksyar ke depan, baik dalam tataran kebijakan maupun implementasi program.

Berdasarkan arah pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ke depan disertai dengan hasil evaluasi terhadap program pengembangan EKS yang sudah berjalan di periode sebelumnya, terdapat dua skenario *positioning* KNEKS sebagai pemimpin orkestrasi arah kebijakan EKS di Indonesia termasuk dalam hal pengembangan kapasitas SDM EKS. Skenario pertama adalah program pengembangan SDM EKS diposisikan integratif dan bersifat *embedded* dengan

program utama sektoral yang dilakukan oleh berbagai K/L. Sedangkan untuk skenario kedua adalah program pengembangan SDM EKS dilakukan secara khusus dan terpisah untuk memastikan bahwa kualifikasi SDM EKS benar-benar dapat memenuhi kebutuhan dari industri.

### 5.1. Skenario *Positioning* KNEKS dalam Program Pengembangan SDM EKS yang Bersifat Intergratif

Dalam skenario *positioning* yang bersifat integratif, berbagai program pengembangan SDM EKS menjadi bagian dari program kerja utama KNEKS dan K/L yang menjadi *stakeholders*. Sebagai contoh adalah salah satu program utama klaster industri halal yaitu Pengembangan Zona Halal dalam Kawasan Industri. *Stakeholders* yang menjadi pelaksana teknis utama meliputi Kementerian Perindustrian, BPJPH, Asosiasi Pengusaha Logistik Indonesia. Dengan *positioning* yang bersifat integratif, maka KNEKS dapat memiliki peran untuk memastikan bahwa setiap program yang dimiliki para K/L atau asosiasi terkait pengembangan zona halal ini sudah mencakup program yang berhubungan dengan peningkatan kapasitas (*capacity building*) dari para SDM pelaksana teknis.

Untuk menjalankan peran melalui skenario ini, dibutuhkan perencanaan yang matang dan terarah dari program pengembangan EKS secara umum dan langkah taktis pengembangan SDM nya secara khusus. Selain itu perencanaan ini juga harus dilengkapi dengan pemetaan yang detail terkait peran dari masing-masing *stakeholders* yang terlibat. Hal ini sangat penting untuk dipastikan mengingat rencana pengembangan program EKS ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan kelembagaan masing-masing institusi yang harus disusun secara regular dan melibatkan proses administrasi seperti penganggaran yang biasanya disusun di awal periode perencanaan.

Dalam pelaksanaannya, dibutuhkan fungsi pengendalian, koordinasi, pengawasan dan evaluasi yang diambil oleh KNEKS. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa pelaksanaan program yang dilakukan sesuai dengan target yang telah direncanakan. Untuk menjalankan proses ini KNEKS membutuhkan kekuatan berupa wewenang yang memiliki kekuatan hukum, karena tidak memiliki kekuatan secara mekanisme keuangan (penganggaran) yang biasanya dapat dijadikan sebagai prosedur teknis pengendalian dan pengawasan program. Perencanaan yang jelas dan wewenang pengendalian inilah yang dapat dijadikan oleh KNEKS untuk memastikan secara umum kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh *stakeholders* terkait telah selaras (*convergence*) menuju pencapaian pengembangan ekonomi syariah yang lebih progresif.

**Tabel 5.2. Pertimbangan Pros & Cons dalam Skenario Pengembangan Program SDM EKS yang Bersifat Integratif**

Aspek	Pros	Cons
Anggaran	<ul style="list-style-type: none"> <li>Efisiensi Anggaran: Mengurangi duplikasi program dengan memanfaatkan program yang sudah dilaksanakan oleh K/L dan <i>stakeholders</i> lainnya</li> </ul>	
Sinergi Lintas Sektor	Memungkinkan pendekatan holistik dalam pengembangan SDM EKS	
Kebutuhan Sektoral	Program SDM sesuai dengan prioritas industri masing-masing	
Komitmen <i>Stakeholders</i>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Kompleksitas Koordinasi: membutuhkan tingkat koordinasi yang tinggi, yang berisiko menimbulkan konflik antar K/L</li> <li>Keberhasilan bergantung pada komitmen kementerian/lembaga yang bersangkutan.</li> <li>Sulit memastikan bahwa semua program berjalan seragam sesuai visi bersama.</li> </ul>

### 5.2. Skenario *Positioning* KNEKS dalam Program Pengembangan SDM EKS yang Bersifat Direktif

Dalam skenario *positioning* yang bersifat direktif, berbagai program pengembangan SDM EKS yang dilakukan baik oleh KNEKS maupun K/L *stakeholders* berada di bawah orkestrasi KNEKS yang memberikan arahan sektor-sektor EKS yang akan menjadi prioritas. Dengan demikian, berbagai kementerian teknis terkait akan memiliki peran sentral dalam membuat program spesifik pengembangan SDM EKS yang dibutuhkan sesuai dengan prioritas agenda pembangunan nasional.

Sebagai contoh, dalam Cita 4 dinyatakan bahwa vaksin halal menjadi salah satu upaya dalam memperkuat sistem kesehatan nasional melalui kekuatan berbasis lokal. Hal ini dapat berimplikasi pada prioritas pengembangan vaksin halal di industri farmasi halal akan sangat membutuhkan SDM yang memiliki kapabilitas dalam pengembangan vaksin ini. Dengan *positioning* KNEKS yang bersifat direktif, KNEKS dapat memiliki peran sebagai inisiator dalam memberikan arahan program SDM dari hulu ke hilir yang mendapat *men-support* perkembangan industri farmasi halal, misalnya mulai dari kurikulum pendidikan tinggi sampai dengan sertifikasi. Dengan *direction* tersebut, diharapkan *supply* sumber daya manusia yang akan terserap di industri farmasi halal akan sesuai (*match*) dengan kebutuhan industri dalam meningkatkan *value added* produksi.

Dalam menjalankan model skenario ini, KNEKS merupakan motor penggerak utama pengembangan SDM Syariah pada bidang/program yang telah ditentukan. KNEKS berperan sebagai pengendali utama terhadap berjalannya agenda yang telah ditetapkan sementara itu K/L dan institusi lainnya sebagai partner aktif. Dalam hal ini dibutuhkan komitmen dan koordinasi aktif antar lembaga dan pembagian peran yang jelas antar lembaga yang menjalankan. KNEKS dapat berperan lebih aktif dan menjadi penanggung jawab terhadap berjalannya program yang dilakukan. Sebagai konsekuensi dari skenario ini dibutuhkan komitmen anggaran pendanaan khusus.

**Tabel 5.3. Pertimbangan Pros & Cons dalam Skenario Pengembangan Program SDM EKS yang Bersifat Direktif**

Aspek	Pros	Cons
Anggaran		Membutuhkan komitmen anggaran untuk mendesain dan menjalankan program sendiri.
Sinergi Lintas Sektor		Berisiko tumpang tindih dengan program K/L jika koordinasi tidak optimal.
Kebutuhan Sektoral	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Program dirancang secara khusus untuk menjawab kebutuhan SDM industri.</li> <li>• Memungkinkan pendekatan berbasis standar nasional/internasional.</li> </ul>	
Peran KNEKS	KNEKS memiliki otoritas untuk memastikan program	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kapasitas Internal: Memerlukan penguatan</li> </ul>

Aspek	Pros	Cons
	berjalan sesuai visi dan tujuan arah pembangunan nasional	internal di KNEKS untuk mengelola program besar.

Secara umum, kedua opsi skenario tidak dapat berjalan sendiri-sendiri (atau secara *mutually exclusive*) karena begitu luasnya industri yang berada di bawah ekosistem EKS di Indonesia. Berbagai klaster yang ada memiliki tingkat *maturity* yang berbeda serta atmosfer regulasi yang berbeda serta *initial condition* dari kapasitas SDM yang berbeda. Dengan demikian, dalam memilih jenis strategi program pengembangan SDM EKS, beberapa kriteria juga perlu dipertimbangkan yaitu mencakup kematangan ekosistem, kebutuhan SDM, ketersediaan sumber daya, kompleksitas koordinasi antara pemangku kepentingan, serta derajat urgensi program (lihat Tabel 5.4).

**Tabel 5.4. Tipologi Program Pengembangan SDM EKS: Integratif vs Direktif**

Kriteria	Integratif	Direktif
Kematangan Ekosistem	Ekosistem telah mapan, program pengembangan SDM sudah berjalan dengan baik di kementerian atau lembaga.	Ekosistem belum terbangun atau masih memerlukan arah strategis dari pusat, seperti kurikulum nasional.
Kebutuhan SDM	Kebutuhan bersifat teknis atau operasional, bisa dipenuhi oleh program lintas sektor.	Kebutuhan spesifik, strategis, atau memerlukan inovasi besar untuk sektor prioritas.
<i>Resource Availability</i>	Sumber daya cukup tersedia melalui kolaborasi dengan K/L dan stakeholders lainnya.	Mebutuhkan sumber daya tambahan yang dirancang khusus oleh KNEKS, seperti anggaran mandiri.
Koordinasi Stakeholders	Banyak pemangku kepentingan yang aktif, sehingga koordinasi lintas sektor menjadi lebih efektif.	Fragmentasi antarlembaga tinggi, sehingga dibutuhkan arahan pusat untuk memastikan program terintegrasi.
Urgensi Program	Program tidak terlalu mendesak atau dapat dikembangkan secara bertahap bersama stakeholders.	Program sangat mendesak, misalnya untuk memenuhi kebutuhan SDM di sektor baru atau prioritas nasional.

Merujuk pada berbagai pertimbangan *pros* dan *cons* serta beberapa kriteria tipologi dari masing-masing skenario pengembangan, maka didapatkan perbedaan antar skenario sebagai berikut:



Tabel 5.5. Perbedaan Skenario Integratif dan Direktif berdasarkan Aspek

Aspek	Integratif	Direktif
<b>Peran KNEKS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengoordinasikan program lintas K/L untuk memastikan pengembangan SDM EKS terintegrasi dalam inisiatif sektoral.</li> <li>• Mengembangkan peta jalan bersama dengan <i>stakeholders</i> untuk memastikan konsistensi program.</li> <li>• Mengawasi pelaksanaan program agar sesuai dengan target dan hasil yang direncanakan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menetapkan prioritas sektor dan menyusun program khusus untuk pengembangan SDM EKS.</li> <li>• Menyediakan panduan teknis dan kebijakan bagi K/L dalam pengembangan SDM sesuai kebutuhan nasional.</li> <li>• Menginisiasi program dari hulu (kurikulum pendidikan) hingga hilir (sertifikasi dan pelatihan industri).</li> </ul>
<b>Regulasi Pendukung</b>	Aturan formal yang mengamankan koordinasi lintas K/L di bawah pengawasan KNEKS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regulasi yang memberikan otoritas penuh kepada KNEKS untuk mengarahkan dan mengendalikan program SDM.</li> <li>• Alokasi dana khusus untuk implementasi program secara independen.</li> </ul>
<b>Komitmen Stakeholders</b>	Dukungan aktif dari K/L terkait dalam hal anggaran, sumber daya manusia, dan pelaksanaan program.	Kemitraan strategis dengan perguruan tinggi dan pelaku industri.
<b>Sistem Monitoring dan Evaluasi</b>	Mekanisme untuk mengukur keberhasilan program secara berkala.	Basis data komprehensif tentang kebutuhan SDM di berbagai sektor EKS.
<b>Klaster EKS yang Sesuai</b>	Keuangan Komersial Syariah, Industri Halal	Keuangan Sosial Syariah, Bisnis & Kewirausahaan Syariah

### 5.3. Pre-Requisites dalam Skenario Positioning KNEKS untuk Program Pengembangan SDM EKS

Apapun jenis skenario terpilih pada program pengembangan SDM EKS di Indonesia, terdapat beberapa pra-syarat guna memastikan efektivitas implementasi program dari hulu ke hilir. Beberapa pra-syarat yang dimaksud mencakup:

#### 1. Sinkronisasi Program secara Internal dan Eksternal

Koordinasi internal antar divisi di dalam KNEKS sangatlah krusial untuk memastikan sinergi dan efisiensi dalam pelaksanaan program. Divisi-divisi seperti Bisnis Digital dan Divisi Kemitraan,

misalnya, memiliki potensi untuk saling mendukung melalui penggabungan data dan sumber daya. Dengan menyelaraskan inisiatif-inisiatif yang dilakukan maka dapat menciptakan pendekatan yang lebih terpadu dalam membangun ekosistem ekonomi Syariah termasuk menciptakan SDM Unggul untuk pengembangan ekosistem ekonomi Syariah nasional. Selain itu, sinkronisasi eksternal dengan mitra-mitra strategis seperti kementerian terkait, lembaga keuangan, dan organisasi masyarakat adalah langkah penting untuk memperluas dampak dari program-program yang dilakukan. Kolaborasi yang lebih erat dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, misalnya, dapat meningkatkan akses UMKM syariah terhadap program pelatihan dan pendampingan yang ditawarkan. Hal ini membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan integratif dalam membangun jaringan kerja yang solid dengan pihak-pihak eksternal.

## **2. Sinkronisasi Peta Jalan dengan Pelaksanaan Agenda Nasional**

Peta jalan yang disusun harus selaras dengan visi dan misi nasional, seperti yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Ini tidak hanya memberikan kerangka kerja yang lebih luas bagi inisiatif yang dilakukan tetapi juga memungkinkan untuk menempatkan ekonomi syariah dalam konteks yang lebih strategis dan relevan dengan prioritas pembangunan nasional. Lebih lanjut, setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik dan kebutuhan yang unik. Oleh karena itu, penting untuk melakukan sinkronisasi dengan kebijakan regional dan memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan dapat diadaptasi dan diimplementasikan sesuai dengan konteks lokal. Ini akan memungkinkan untuk merespons secara lebih efektif terhadap tantangan dan peluang yang ada di setiap wilayah. Dalam hal koordinasi daerah, KNEKS dan pemerintah dapat mengoptimalkan peran KDEKS serta agenda pemerintah daerah terkait pengembangan ekonomi syariah.

## **3. Penguatan Peran dan Koordinasi KNEKS**

KNEKS harus terus memperkuat peranannya sebagai penggerak utama dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas internal dalam hal kepemimpinan dan koordinasi, serta penguatan hubungan dengan kementerian, lembaga pemerintah, dan sektor swasta. Dalam hal ini, kolaborasi dengan kementerian dan lembaga seperti Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat penting untuk dilakukan. Melalui kemitraan yang lebih erat, maka dapat membuka peluang baru untuk inisiatif ekonomi syariah dan memperkuat dukungan terhadap program-program yang sedang dan akan dijalankan. KNEKS perlu terus berperan sebagai fasilitator yang efektif dan sebagai

penghubung yang kuat antara berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem ekonomi syariah. Penguatan peran ini tentunya harus didukung dengan regulasi yang kuat. Karena dalam pelaksanaan pengembangan program yang dilakukan KNEKS selama ini terbentur oleh wewenang untuk melaksanakan program yang masif dan berkelanjutan.

#### **4. Regulasi Pendukung Keberlanjutan Program**

Keberlanjutan dari program-program KNEKS sangat bergantung pada regulasi pendukung yang kuat. Regulasi ini bukan hanya tentang aturan formal, tetapi juga tentang menciptakan fondasi yang kuat bagi program yang dilaksanakan untuk berkembang dan beradaptasi sesuai kebutuhan masyarakat dan pasar. Regulasi yang mendukung akses pembiayaan syariah, standar pelatihan, dan inovasi digital perlu terus dikembangkan dan disempurnakan. Selain itu, kepastian hukum dan perlindungan yang diberikan oleh regulasi sangat penting untuk membangun kepercayaan dan rasa aman bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem ekonomi syariah. Regulasi yang tepat dan komprehensif akan membantu kita menjaga stabilitas dan mendorong partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dan dunia usaha. Selain itu regulasi ini juga perlu mencakup bagaimana peran yang lebih optimal dari KNEKS.

#### **5. Sinkronisasi *Database* Program Pengembangan SDM EKS Antar-Kementerian dan Lembaga**

Sinkronisasi *database* yang memuat daftar program terkait pengembangan SDM EKS yang dijalankan oleh berbagai kementerian dan lembaga merupakan langkah penting untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program. Database ini akan berfungsi sebagai pusat informasi terintegrasi yang mencakup data program pelatihan, sertifikasi, pendidikan, dan inisiatif lainnya yang telah dan sedang dijalankan oleh para pemangku kepentingan. Dengan adanya sinkronisasi, potensi redundansi program dapat dihindari, sehingga alokasi sumber daya menjadi lebih optimal. Selain itu, harmonisasi antarprogram dapat tercapai dengan mengidentifikasi kesenjangan dan area kolaborasi potensial di antara stakeholders. Database ini juga dapat menjadi dasar untuk perencanaan strategis dan monitoring yang lebih akurat, memastikan bahwa program-program SDM EKS berjalan selaras dengan visi nasional dan kebutuhan industri.

#### **6. Peningkatan Kompetensi Digital untuk SDM dan Sistem Operasional**

Dalam era digitalisasi, pengembangan SDM EKS harus mencakup peningkatan kompetensi dalam teknologi informasi dan digital. Hal ini tidak hanya berlaku untuk tenaga kerja yang akan terjun ke industri, tetapi juga bagi pengelola program di tingkat KNEKS dan kementerian/lembaga lainnya. Adopsi teknologi seperti *cloud computing*, *big data analytics*, dan *blockchain* dalam pengelolaan program akan memungkinkan implementasi yang lebih efektif

dan efisien. Sistem operasional yang berbasis digital juga akan mendukung pengelolaan data, monitoring, dan evaluasi program dengan akurasi yang lebih baik.

#### **7. Pemanfaatan Potensi Lokal melalui Kolaborasi Daerah**

Pengembangan SDM EKS perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi lokal di setiap daerah untuk memastikan relevansi dan dampak maksimal. Kolaborasi dengan pemerintah daerah, komunitas lokal, perguruan tinggi, dan pelaku usaha di wilayah tertentu menjadi langkah penting untuk menciptakan pendekatan berbasis kebutuhan lokal. Hal ini juga dapat memfasilitasi pemerataan pengembangan ekonomi syariah di seluruh Indonesia, sehingga setiap daerah memiliki kesempatan yang setara untuk berkontribusi pada ekosistem EKS nasional. Pemanfaatan potensi lokal akan mendukung diversifikasi sumber daya dan memastikan keberlanjutan program.

## BAB 6. PENUTUP

Penyusunan Peta Jalan Pengembangan SDM Unggul Ekonomi Syariah merupakan langkah strategis yang krusial dalam memastikan pengembangan EKS di Indonesia dapat sejalan dengan kebutuhan pasar dan mendukung pertumbuhan EKS yang progresif. Peta Jalan Pengembangan SDM Unggul 2021-2024 yang sebelumnya dirancang oleh KNEKS telah memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengarahkan pengembangan SDM EKS selama tiga tahun terakhir. Namun, evaluasi menyeluruh terhadap peta jalan ini menjadi keharusan untuk menjamin keberlanjutan dan relevansi pengembangan SDM EKS.

Evaluasi terhadap Peta Jalan Pengembangan SDM Unggul Ekonomi Syariah 2021-2024 menggaris bawahi beberapa hal penting terkait capaian, tantangan, peluang dan catatan kritis yang muncul dalam pengembangan SDM di sektor ekonomi dan keuangan Syariah serta rekomendasi perbaikan yang perlu dilakukan kedepan. Selama periode implementasi, berbagai program telah dirancang dan diterapkan dengan hasil yang variatif di setiap klaster (keuangan komersial syariah, industri halal, keuangan sosial syariah, dan bisnis dan kewirausahaan Syariah). Beberapa capaian utama yang patut diapresiasi diantaranya digitalisasi proses sertifikasi, pengembangan program pendidikan berbasis kompetensi, serta kolaborasi lintas sektor yang memperkuat kapasitas SDM syariah.

Namun demikian, evaluasi ini juga mengidentifikasi tantangan mendasar yang perlu segera diatasi. Beberapa di antaranya meliputi keterbatasan latar belakang SDM yang sesuai dengan kebutuhan industri, hambatan birokrasi yang memperlambat implementasi program, dan adopsi teknologi yang belum merata di seluruh wilayah dan sektor. Selain itu, masih terdapat kebutuhan untuk memperkuat integrasi program antara berbagai pemangku kepentingan guna meningkatkan efisiensi dan dampak program secara keseluruhan.

Evaluasi Peta Jalan ini menawarkan dua skenario pendekatan pengembangan SDM EKS yaitu skenario pendekatan integratif dan direktif. Pendekatan integratif adalah strategi di mana KNEKS berperan sebagai koordinator utama yang memastikan program pengembangan SDM EKS yang dijalankan oleh K/L dan stakeholders terintegrasi, efisien, dan selaras dengan visi Bersama yang berfokus pada sinergi lintas sektor. Pendekatan ini cocok untuk ekosistem yang mapan dengan kebutuhan SDM yang bersifat teknis atau operasional. Pendekatan ini secara umum lebih efisien dalam penggunaan sumber daya namun di sisi lain menuntut komitmen dan koordinasi tinggi dari semua pihak.

Sebaliknya, pendekatan direktif menempatkan KNEKS sebagai penggerak utama yang menetapkan prioritas sektor, mendesain program khusus, dan memberikan arahan strategis untuk pengembangan SDM dari hulu ke hilir. Pendekatan ini diperlukan untuk sektor baru atau strategis yang memerlukan inovasi besar. Dengan otoritas penuh dan dukungan anggaran, KNEKS mampu mengarahkan pengembangan SDM sesuai kebutuhan nasional, meskipun membutuhkan kapasitas internal yang kuat dan koordinasi yang intensif.

Kedua pendekatan ini tidak bersifat *mutually exclusive* yang dapat berjalan bersamaan tergantung pada tipologi dari masing-masing cluster, sektor atau program. Pendekatan integratif digunakan untuk sektor yang sudah mapan, sementara pendekatan direktif diterapkan untuk sektor prioritas atau yang membutuhkan arahan strategis. Pemetaan terhadap tipologi dan pendekatan yang tepat untuk diadopsi merupakan langkah penting yang harus dilakukan.

Untuk mendukung pelaksanaan skenario tersebut serta memastikan pengembangan SDM dan EKS secara umum di Indonesia dapat berjalan secara optimal dan lebih berdampak, evaluasi ini juga memberikan rekomendasi strategis yang perlu dilakukan kedepannya. Pertama, perlunya sinkronisasi program secara internal dan eksternal, termasuk koordinasi yang lebih baik antara KNEKS dan kementerian/lembaga terkait. Kedua, penyelarasan peta jalan dengan agenda nasional untuk memastikan keselarasan dengan target pembangunan nasional yang lebih luas. Ketiga, penguatan peran dan koordinasi KNEKS sebagai aktor sentral dalam mengarahkan pengembangan SDM syariah. Keempat, penyempurnaan regulasi pendukung keberlanjutan program guna menciptakan kerangka hukum yang lebih mendukung implementasi jangka panjang.

KNEKS, sebagai ujung tombak pengembangan EKS di Indonesia, diharapkan untuk dapat terus berinovasi dan memperkuat perannya sebagai penggerak utama ekosistem EKS. Respon terhadap perubahan kebutuhan industri yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun global, harus menjadi perhatian utama. Dalam hal ini, adopsi teknologi terbaru, peningkatan literasi keuangan syariah, dan penguatan konektivitas program dengan kebutuhan industri merupakan langkah-langkah penting yang perlu dilakukan.

Di sisi lain, KNEKS juga perlu fokus pada penguatan kapasitas kelembagaan dan jaringan kemitraan di tingkat nasional untuk memastikan implementasi program berjalan lebih efektif. Ini mencakup optimalisasi peran KDEKS (Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah) dalam mendukung pengembangan EKS di berbagai wilayah Indonesia. Dengan memanfaatkan potensi lokal dan memfasilitasi sinergi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, serta lembaga pendidikan, KNEKS dapat menciptakan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis kebutuhan

lokal. Pendekatan ini tidak hanya memperluas dampak program tetapi juga mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi syariah di seluruh Indonesia.

Dengan adanya evaluasi ini, KNEKS diharapkan memiliki landasan untuk merancang langkah-langkah strategis ke depan. Pembangunan SDM yang inklusif, berkelanjutan, dan relevan akan menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan sektor EKS di Indonesia. Lebih lanjut, upaya ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat rujukan global dalam pengembangan SDM unggul dan talenta syariah yang berdaya saing tinggi. Sehingga, dengan sinergi, inovasi, dan kerja sama yang berkelanjutan visi untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain utama dalam ekonomi syariah global dapat diwujudkan.